

# AKUMULASI PRIMITIF DAN PENGALAMAN HISTORIS DI SULAWESI TENGAH

ARIANTO SANGADJI

“To i lore ine mengkatirema (Creature(s) of the Mountains, do not eat our crops)”<sup>1</sup>

## ABSTRAK

TEORI tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*) menjelaskan proses panjang dan penuh kekerasan perampasan tanah terhadap masyarakat non-kapitalis. Masyarakat yang kehilangan lahan pertanian itu lantas beralih menjadi kelas pekerja bebas. Menggunakan teori tersebut, tulisan ini menginvestigasi momen-momen historis akumulasi primitif di Sulawesi Tengah. Karena kolonialisme adalah salah satu mekanisme akumulasi primitif, maka penjelasan tentang akumulasi primitif di wilayah ini bertolak dari mekanisme tersebut. Sebagai sebuah proses yang terus berlanjut, maka tulisan ini melihat kenyataan kontemporer proses-proses perampasan tanah dan penciptaan kelas pekerja bebas di daerah ini.

## KERANGKA TEORI

KERJA dan tanah (termasuk sumber daya yang terletak di atas dan di bawahnya) adalah dua aspek paling asasi dari produksi dan reproduksi kehidupan manusia dalam corak produksi manapun (i.e., komunal primitif, perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme). Tetapi, bagaimana produksi dan reproduksi itu berlangsung berbeda dari satu corak dengan corak produksi lain. Isu utama dalam akumulasi primitif adalah transformasi penguasaan terhadap *tenaga kerja* dan *tanah* sebagai alat produksi dari corak produksi non-kapitalis ke corak kapitalisme. Melalui akumulasi primitif akan terbentang 'karpas merah' bagi kelas kapitalis untuk mengontrol tenaga kerja dan tanah di dalam proses kerja (*labour process*) yang kapitalistik.

Ekonomi politik liberal menggambarkan asal-muasal kelahiran kapitalisme sebagai hasil dari evolusi secara alamiah kekayaan atau uang secara kuantitatif yang memungkinkan terjadi investasi. Sebaliknya, Marx melihatnya sebagai sebuah proses yang tidak alamiah. Di bagian delapan dari *Capital volume I*, Marx melukiskan transisi menuju kapitalisme sebagai sebuah proses perubahan besar dan mendasar dalam hubungan-hubungan (sosial) produksi. Dia menggunakan konsep akumulasi primitif untuk menggambarkan transformasi kualitatif itu yang secara historik terjadi di Eropa Barat, yang merupakan kampung halaman kelahiran kapitalisme. Tetapi penting diingat, akumulasi primitif adalah konsep yang berbeda dari akumulasi kapital (*capital accumulation*), kendati keduanya merupakan bagian-bagian yang berhubungan dalam konseptualisasi kapitalisme secara keseluruhan. Perbedaannya, akumulasi primitif terjadi atau berlangsung di dalam ruang masyarakat non-kapitalis, yakni proses perampasan alat-alat produksi dan penghancuran hubungan-hubungan produksi masyarakat tersebut. Sebaliknya, akumulasi kapital terjadi di dalam ruang produksi kapitalis

---

<sup>1</sup> Bait dalam *Raeogo Wunca*, Lihat Lorraine V. Aragon, “Suppressed and Revised Performance Raeogo' Songs of Central Sulawesi”, *Ethnomusicology*, 40 No 3 (1996), 421.

yakni proses produksi nilai (*value*) dan nilai-lebih (*surplus-value*) atau proses eksploitasi terhadap kelas pekerja bebas. Keduanya berhubungan, karena akumulasi primitif merupakan anteseden terhadap proses akumulasi kapital. Marx bilang, akumulasi primitif terjadi sebelum akumulasi kapital, di mana akumulasi primitif bukan buah dari corak produksi kapitalis, tetapi merupakan titik berangkat dari corak produksi itu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, akumulasi primitif kurang lebih merupakan “original sin”, seperti pandangan teologis tentang asal-usul manusia, dari kapitalisme.<sup>3</sup> Marx memberi label primitif, karena proses ini membentuk prasejarah kapitalisme dan corak produksi yang berkaitan dengan kapital.<sup>4</sup> Dia mengidentifikasi kaitan tersebut antara kelahiran corak produksi kapitalis dengan kehancuran corak produksi feodal.<sup>5</sup>

Akumulasi primitif mengandung dua hal yang saling berkaitan. *Pertama*, ini adalah proses historis yang memisahkan produsen dari alat produksi. Marx bilang: “The so-called primitive accumulation, therefore, is nothing else than the historical process of divorcing the producer from the means of production.”<sup>6</sup> Dalam konteks ini, Marx menegaskan bahwa penyingkiran produsen pertanian, i.e., para petani pemilik berskala kecil, dari tanah adalah landasan utama dari keseluruhan proses akumulasi primitif.<sup>7</sup> Tanah dalam jumlah besar, yang berada di bawah sistem kepemilikan kolektif, dirampas dan dikonversikan menjadi kapital. *Kedua*, para produsen pertanian tadi lantas tidak memiliki lagi sesuatu untuk dijual, kecuali dengan bebas menjual tenaga kerja mereka sebagai kelas pekerja, setelah keseluruhan alat produksi (tanah) mereka dirampok.<sup>8</sup> Oleh karena itu, mereka adalah pekerja bebas dalam dua pengertian sekaligus: mereka tidak memiliki alat produksi sebagaimana dalam kasus budak dalam corak produksi perbudakan dan buruh pertanian dalam corak feodalisme, dan juga tidak memiliki alat produksi sebagaimana petani pemilik yang mengusahakan lahan pertaniannya secara swadaya.<sup>9</sup> Dengan kata lain, akumulasi primitif merupakan mekanisme untuk menciptakan kelas pekerja bebas atau kelas proletar modern untuk siap dieksploitasi di dalam corak produksi kapitalis. Tenaga kerja dikonversi menjadi kapital.

Kekerasan adalah senjata utama proses akumulasi primitif, di mana para produsen dipisahkan secara *paksa* dari alat produksi mereka melalui penghancuran berbagai bentuk sistem kepemilikan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Seperti dikatakan oleh Marx, proses ini berlangsung melalui berbagai bentuk kekerasan seperti penaklukan, perbudakan, perampokan, pembunuhan. Pendek cerita, penggunaan kekuasaan memainkan

---

<sup>2</sup> Karl Marx, *Capital Volume I*, (London & New York: Penguin Books, 1976), 873.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., 875.

<sup>5</sup> Ibid., 875.

<sup>6</sup> Ibid., 875.

<sup>7</sup> Ibid., 876.

<sup>8</sup> Marx menyimpulkan sebagai berikut: “The process ... that clears the way for the capitalist system, can be none other than the process which takes away from the labourer the possession of his means of production, a process that transform, on the one hand, the social means of subsistence and of production into capital, on the other, the immediate producers into wage-labourers.” Lihat Marx, *Capital I*, 714-5.

<sup>9</sup> Ibid., 874.

peran kunci dalam proses akumulasi primitif.<sup>10</sup> Jadi, proses kelahiran kapitalisme bukan bersifat alamiah, damai, dan sukarela. Proses ini, seperti Marx bilang, “written into the annals of mankind in letters of blood and fire.”<sup>11</sup> Atau, identik dengan kata-kata Luxemburg: “force is the only solution open to capital”.<sup>12</sup> Dalam Bab 31 tentang *The Genesis of the Industrial Capitalist*, Marx melukiskan era paling awal produksi kapitalis melalui momen penting akumulasi primitif yang brutal dengan mengatakan bahwa:

“The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the indigenous population of that continent ... are all things which characterize the dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief moments of primitive accumulation.”<sup>13</sup>

Perhatian Marx terhadap akumulasi primitif adalah bagaimana proses ini terjadi secara global, dengan Eropa Barat, terutama Inggris, sebagai pusat perhatian. Dia menyebut Inggris sebagai “the classic form”, bentuk klasik dari akumulasi primitif.<sup>14</sup> Di Inggris, proses-proses “enclosure”, yakni proses perampasan tanah-tanah komunal yang terjadi antara abad 16 dan 18, adalah karakter utama dari akumulasi primitif.<sup>15</sup> Marx lantas bilang bahwa di Eropa Barat, proses akumulasi primitif kurang lebih sudah tercapai. Di sana, regim kapitalis sudah secara langsung menyubordinasikan keseluruhan produksi nasional dan secara tidak langsung mengendalikan hubungan-hubungan ekonomi yang kurang berkembang atau corak produksi non-kapitalis.<sup>16</sup> Penting disoroti, Marx memberikan perhatian historis terhadap akumulasi primitif sebagai proses global. Dia mendiskusikan tentang bagaimana proses ini terjadi di belahan dunia non-Eropa melalui sistem kolonialisme Barat di benua-benua Afrika, Amerika, dan Asia. Dalam konteks ini, percakapan tentang akumulasi primitif di kepulauan nusantara di zaman Belanda menjadi penting. Mengutip buku Raffles tentang *History of Java*, Marx menulis sebuah paragraf tentang brutalitas akumulasi primitif di Indonesia:

“The history of Dutch colonial administration – and Holland was the model capitalist nation of the seventeenth century – is 'one of the extraordinary relations of treachery, bribery, massacre, and meanness'. Nothing is more characteristic than their system of stealing men in Celebes, in order to get slave for Java. Man-stealers were trained for this purpose. The thief, the interpreter and the seller were the chief agents in this trade, the native princes were the chief sellers. The young people thus stolen were hidden in secret dungeons on Celebes, until they were ready for sending to the slave-ships... 'This one town of Macassar, for example, is full of secret prisons, one more horrible than the other, crammed with unfortunates, victims of greeds and tyranny fettered in chains, forcibly torn from their families'... Wherever they set foot, devastation and

---

<sup>10</sup> Ibid., 874.

<sup>11</sup> Ibid., 875.

<sup>12</sup> Rosa Luxemburg, *The Accumulation of Capital*, (London & New York: Routledge & Kegan Paul, 2003).

<sup>13</sup> Marx, *Capital I*, 915.

<sup>14</sup> Ibid., 876.

<sup>15</sup> Ibid., 885-9; Lihat juga Ellen Meiksins Wood, *The Origin of Capitalism: A longer view*, (London & New York: Verso, 2002), 108-9, 128-9, 162-3.

<sup>16</sup> Marx, *Capital I*, 931.

depopulation followed. Banyuwangi, a province of Java, number over 80,000 inhabitants in 1750 and only 18,000 in 1811. That is peaceful commerce!"<sup>17</sup>

Tentu saja, kita boleh memperpanjang narasi historis akumulasi primitif tersebut dengan memasukan semua praktik kekerasan VOC, penerapan sistem tanam paksa, hingga kekerasan-kekerasan sesudah era politik etis dan liberalisme, dalam rangka pengerukan kekayaan dari Nusantara. Tetapi, penting digaris-bawahi, setiap percakapan tentang akumulasi primitif kontemporer di Indonesia paska kolonial *mesti* bertolak dari investigasi historis terhadap proses ini yang terjadi sejak zaman kolonial. Karena penghancuran masyarakat non-kapitalis sebagai syarat kelahiran masyarakat kapitalis di kepulauan nusantara berjalan melewati proses sejarah yang panjang dan kompleks itu.

Kembali ke isu teoritik, setelah Marx, muncul perbedaan interpretasi tentang akumulasi primitif. Rosa Luxemburg berusaha mengembangkan proyek teoritik akumulasi primitif. Bertolak dari teori Marx tentang reproduksi kapital, yakni akumulasi kapital, Luxemburg menganggap bahwa proses reproduksi itu sangat bergantung pada masyarakat non-kapitalis. Dengan kata lain, kapitalisme menghadapi masalah dengan pasar internal, yakni ketidak-mampuan pasar domestik masyarakat kapitalis untuk mengonsumsi semua komoditi yang telah dihasilkan di dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, dia bilang, realisasi nilai-lebih, yakni transfer komoditi yang dihasilkan menjadi kapital, bergantung pada pasar yang tersedia di masyarakat non-kapitalis. Atau, untuk merealisasi nilai-lebih, maka barang atau komoditi yang dihasilkan dalam produksi kapitalis bukan saja dijual kepada kelas pekerja dan kelas kapitalis, tetapi juga bergantung kepada pembeli-pembeli dari masyarakat yang corak produksinya bukan kapitalis. Kata Luxemburg, "it is impossible that the capitalised surplus-value [...] can be realised within the capitalist realm. [It] must be sold out of capitalist sphere".<sup>18</sup> Ringkasnya, untuk menstabilkan dirinya, atau keluar dari krisis akumulasi kapital, maka kapitalisme bergantung kepada masyarakat non-kapitalis sebagai pasar eksternal. Di sisi lain, menurut dia, kapitalisme menghadapi kesulitan melakukan reproduksi, karena di permukaan bumi masih terdapat masyarakat-masyarakat non-kapitalis. Oleh karena itu, agar terhindar dari krisis dan tetap tumbuh, maka kapitalisme mesti melakukan penghancuran dan pemusnahan terhadap semua masyarakat itu dan mengintegrasikan mereka ke dalam cara kerja kapitalisme. Dia beranggapan bahwa ekspansi kapitalisme secara terus-menerus ke wilayah-wilayah non-kapitalis adalah suatu keharusan. Dalam konteks ini, perluasan akumulasi primitif dalam skala global merupakan mekanisme untuk keluar dari krisis. Menurut Luxemburg, senjata akumulasi primitif adalah kolonialisme dan imperialisme.<sup>19</sup>

Belakangan, David Harvey<sup>20</sup> menggunakan konsep akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) untuk memperluas pengertian akumulasi primitif di era kapitalisme neoliberal dewasa ini. Teorinya bersandar pada idenya tentang "*spatio-temporal*

---

<sup>17</sup> Ibid., 916.

<sup>18</sup> Luxemburg, *The Accumulation of Capital*, 339.

<sup>19</sup> Ibid., 348-51

<sup>20</sup> Lihat David Harvey, *The New Imperialism*, (Oxford & New York: Oxford University Press, 2003); David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005).

*fix*", yakni strategi penyelesaian atau penghindaran krisis kapitalisme melalui *penundaan sementara waktu* dan *ekspansi geografis*.<sup>21</sup> Dia sepakat dengan konsep akumulasi primitif Marx, tetapi dalam pengalaman kontemporer, Harvey membatasi pengalaman historis dengan Tiongkok setelah berakhirnya era Ketua Mao.<sup>22</sup> Di negeri itu, proses-proses dekollektivisasi masif terhadap lahan-lahan pertanian di pedesaan telah menyebabkan puluhan juta orang terpaksa berdesak-desakan di gerbang pabrik-pabrik. Mereka antri menjual tenaga kerjanya sebagai kelas proletar dalam produksi kapitalis. Harvey lebih memilih menggunakan konsep akumulasi melalui perampasan, dengan menekankan bahwa proses perampasan merupakan sesuatu yang terjadi bukan saja di masyarakat non-kapitalis, tetapi juga di negeri-negeri kapitalis maju. Dengan kata lain, proses ini juga sedang terjadi di dalam konteks *akumulasi kapital*. Dia menekankan peran sentral negara dalam percepatan proses perampasan melalui redistribusi kekayaan, baik dari lapisan masyarakat bawah ke elit, maupun dari sektor negara ke sektor swasta. Harvey melukiskan akumulasi melalui perampasan untuk menjelaskan praktik-praktik kanibalistik dan predatori yang sangat kompleks seperti privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, dan redistribusi oleh negara.<sup>23</sup>

Tetapi, teori Luxemburg maupun teori Harvey memiliki problem. Kelemahan Luxemburg adalah bahwa dia, dengan bersandar kepada teori "*underconsumption*",<sup>24</sup> menganggap reproduksi kapitalisme bergantung kepada pasar secara eksternal yang tersedia pada masyarakat non-kapitalis. Padahal, proses reproduksi kapitalisme sepenuhnya bergantung kepada skema Marx tentang akumulasi kapital. Kapitalisme memiliki kemampuan mereproduksi dirinya melalui akumulasi kapital, tanpa bergantung kepada pasar non-kapitalis. Artinya, napas sistem ini bergantung kepada eksploitasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja. Kelemahan Harvey adalah konsep akumulasi melalui perampasan digunakan dalam pengertian terlampau luas. Seperti dikatakan salah satu pengkritiknya, Ben Fine, dengan menghomogenisasi seluruh momen yang sangat beragam dan kompleks, argumentasi Harvey menjadi membingungkan.<sup>25</sup> Tom Brass mengeritik Harvey yang menempatkan kekerasan sebagai bagian dari proletarianisasi, ketika Harvey mengklaim bahwa semua bentuk akumulasi primitif hadir di dalam kapitalisme.<sup>26</sup> Padahal, kita tahu

---

<sup>21</sup> Berbeda dengan teori krisis "*underconsumption*" dari Rosa Luxemburg, teori krisis Harvey bersandar pada apa yang disebut dengan "*overaccumulation*". Dia menganggap bahwa krisis di dalam satu teritori terjadi karena *overaccumulation*. Keadaan ini ditandai dengan kelebihan tenaga kerja (peningkatan pengangguran), kelebihan kapital (kelebihan pasokan komoditi yang tidak terserap pasar, kapasitas atau kegiatan produktif tidak beroperasi, dan kelebihan kapital uang yang tidak dapat diinvestasikan di kapital produktif dan investasi yang mengungkan. Lihat David Harvey, "*The 'New Imperialism': Accumulation by dispossession*", *Socialist Register* 2004 (2004), 64.

<sup>22</sup> David Harvey, "*Comments on Commentaries*", *Historical Materialism* 14 No 4 (2006), 158.

<sup>23</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005), 160-5.

<sup>24</sup> Teori ini mengklaim bahwa, secara logik, menjadi tidak mungkin, dalam produksi kapitalis dapat menciptakan kebutuhan yang memadai sehingga bermuara pada krisis. Menurut pandangan ini, karena kelas pekerja memperoleh upah yang jauh di bawah nilai (value) yang mereka hasilkan, maka kebutuhan konsumsi mereka terhadap semua komoditi yang dihasilkan selalu berada di bawah nilai keseluruhan komoditi yang mereka hasilkan. Dari logik ini, maka agar tidak terjatuh ke dalam krisis, maka kapitalisme secara logik bergantung kepada masyarakat non-kapitalis, sebagai *outlet* komoditi-komoditi yang dihasilkan.

<sup>25</sup> Lihat Ben Fine, "*Debating the 'New' Imperialism*", *Historical Materialism* 14 No 4 (2006).

<sup>26</sup> Lihat Tom Brass, "*Unfree Labour as Primitive Accumulation?*", *Capital & Class* 35 No 1 (2011).

dalam kapitalisme, proses akumulasi kapital berlangsung tanpa menggunakan kekuasaan non-ekonomi.

Dengan merujuk pada pengertian akumulasi primitif sebagai perampasan tanah-tanah para petani non-kapitalis dan pengkonversian para petani menjadi buruh upahan bebas sebagai inti argumentasi Marx, maka tulisan ini meletakkan akumulasi primitif sebagai syarat yang diperlukan yang mendahului proses akumulasi kapital. Di sini, akumulasi primitif difahami sebagai prakondisi historis rekonversi alat produksi dan tenaga kerja non-kapitalis ke dalam kapital. Esensi dari proses ini adalah transformasi mendasar dari hubungan-hubungan produksi non-kapitalis menjadi hubungan-hubungan produksi kapitalis. Tetapi, sekali lagi, seperti kata Marx, akumulasi primitif bukan merupakan produk dari corak produksi kapitalisme, tetapi merupakan "point of departure", titik tolak. Dengan demikian, tata urutan logik yang memisahkan akumulasi primitif dari akumulasi kapital dapat dibedakan, di mana yang pertama mendahului yang terakhir.

### **MOMEN-MOMEN HISTORIS AKUMULASI PRIMITIF**

MOMEN-momen kontemporer akumulasi primitif, penghancuran masyarakat non-kapitalis, terus terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya, dalam industri berbasis sumber daya alam, khususnya industri pertambangan, ekspansi kapital ke wilayah non-kapitalis selalu didahului dengan praktik klasik, yakni akumulasi primitif. Banyak studi sudah memberikan perhatian terhadap praktik-praktik modern akumulasi primitif di tengah-tengah intensifikasi neoliberalisme khususnya berkaitan dengan industri pertambangan di berbagai belahan dunia.<sup>27</sup> Proses penyingkiran para petani tradisional dari tanah-tanah mereka sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung melalui berbagai mekanisme. Di Indonesia, jika merujuk ke mekanisme kebijakan pemerintah, maka cukup fair untuk menyatakan bahwa penyingkiran terhadap hak-hak tradisional petani atas tanah sudah berlangsung sekitar satu setengah seabad. Liberalisasi akses atas tanah sudah berjalan sejak zaman kolonial yang menyubordinasikan hak adat atas tanah di bawah hak negara, melalui Undang-undang Agraria 1870. Lalu, setelah kemerdekaan, kendati mengakui hak-hak tradisional atas tanah, tetapi Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya mensubordinasikan hak-hak tersebut ke dalam kerangka hukum nasional.<sup>28</sup> Artinya, negara dapat mengeliminasi hak-hak tradisional atas tanah. Aneka undang-undang sektoral di bidang pertambangan, kehutanan, dll yang muncul sejak zaman Orde Baru memperkuat proses tersebut. Benar, sejak reformasi, telah muncul amandemen UUD 1945 dan UU tentang Hak-hak Azasi Manusia yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tradisional atas tanah. Tetapi praktik-praktik perampasan tanah yang berlangsung masif sebagai syarat demi akumulasi kapital dalam belasan tahun terakhir mengkonfirmasi bahwa

---

<sup>27</sup> c.f., Jasper Ayelazuno, "Continuos Primitive Accumulation in Ghana: The real-life stories of dispossessed peasants in three mining communities", *Review of African Political Economy*, 38 No 130 (2011); Tedd Gordon & Jeffrey R. Webber, "Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin America", *Third World Quarterly*, 29, No 1 (2008); William N. Holden, "The New People's Army and Neoliberal Mining in the Philippines: A struggle against primitive accumulation", *Capitalism Nature Socialism* 25 No 3 (2014).

<sup>28</sup> Daniel Fitzpatrick, "Land, Custom, and the State in Post-Suharto Indonesia", in Jamie S. Davidson and David Henley (eds.) *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*, (London & New York: Routledge, 2007), 137.

aneka regulasi itu hanya 'macam kertas' semata. Negara menjadi motor utama dalam proses perampasan tanah milik petani-petani kecil.

Di sisi lain, jika boleh menyebut jumlah kelas pekerja di Indonesia saat ini, 2013, sekitar 53 juta, maka perlu diingat, angka tersebut tidak jatuh dari langit. Angka tersebut adalah hasil dari proses historis akumulasi primitif yang berlangsung dalam kurun waktu sangat panjang. Transformasi menjadi kelas pekerja bebas (*free labourer*) di bawah corak produksi kapitalis berlangsung melalui perjalanan sejarah yang lama setelah penghancuran corak produksi non-kapitalis. Secara historis, proses ini telah berlangsung sejak era VOC, dimulai dengan penciptaan lapangan pekerjaan dengan kekerasan dalam bentuk perbudakan. Kita mencatat, praktik-praktik perbudakan dan berbagai bentuk kerja paksa (*forced labour*) untuk mengeruk surplus tenaga kerja telah berlangsung sejak zaman kolonial. Juga, upaya kolonial untuk mengeruk pajak dari penduduk menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung mendorong para pekerja non-kapitalis secara perlahan beralih mengerjakan kegiatan-kegiatan produksi berorientasi ekspor untuk mendapatkan uang tunai. Momen-momen historis kelahiran hubungan produksi berbasis tenaga kerja bebas bisa dilacak dari pertengahan abad 19 di pulau Jawa. Hal ini telah ditunjukkan oleh literatur yang sangat terbatas, tetapi cukup menjanjikan, di dalam karya-karya Knight<sup>29</sup> dan juga Elson<sup>30</sup> yang menginvestigasi pertumbuhan kelas pekerja dalam hubungan dengan perkebunan tebu dan industri gula di Jawa sejak paruh pertama abad 19. Meskipun demikian, hingga dekade-dekade pertama awal abad 20 kita masih menyaksikan penggunaan tenaga kerja tidak bebas (*unfreedom labour*) secara luas termasuk dalam usaha-usaha pertambangan dan perkebunan di sejumlah tempat di kepulauan nusantara.<sup>31</sup> Karena dinamika historis dan geografis perkembangan kapitalisme yang tidak merata (*uneven development*) di Indonesia, maka hingga saat ini, proses pembentukan kelas pekerja masih terus berlangsung, tentu saja dengan pertumbuhan dan distribusi kelas pekerja yang tidak merata antar daerah dan antar sektor.

### *Konteks kolonial*

Ketika Marx menempatkan kolonialisme sebagai salah satu kata kunci dari akumulasi primitif, maka baginya, kapitalisme lahir di Eropa Barat berkat praktik-praktik brutalitas secara global. Dan ketika dia memberikan ilustrasi historis tentang kolonialisme Belanda di kepulauan nusantara, maka ia memasukkan Hindia Timur dalam logik tersebut. Tetapi,

---

<sup>29</sup> Lihat G.R. Knight, "Peasant Labour and Capitalist Production in Late Colonial Indonesia: The 'Campaign' at a North Java Sugar Factory, 1840-70", *Journal of Southeast Asian Studies* XX No 2 (1988); G.R. Knight, "From Plantation to Padi-field: The origins of the Nineteenth Century transformation of Java's sugar industry", *Modern Asian Studies* 14 No 2 (1980); G.R. Knight, "The Java Industry as a Capitalist Plantation: A reappraisal", *Journal of Peasant Studies* 19 No 3-4 (1992).

<sup>30</sup> Lihat R.E. Elson, "Sugar Factory Workers and the Emergence of 'Free Labour' in Nineteenth-Century Java", *Modern Asian Studies* 20 No 1 (1986).

<sup>31</sup> Lihat Mary F. Somers Heidhues, *Bangka Tin and Mentok Pepper*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992), 115-6; V.J.H. Houben, "Profit Versus Ethics: Government enterprises in the late colonial state", in Robert Cribb, ed., *The Late Colonial State in Indonesia: Political and economics foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, (Leiden: KITLV Press, 1994); Erwiza, "Miners, Managers and the State: A socio-political history of the Ombilin coal-mines, West Sumatra, 1892-1996", (PhD Diss., Universiteit van Amsterdam, 1999); Lorraine V. Aragon, "Japanese Time" and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands", *Journal of Southeast Asian Studies* 27 No 1 (1996).

dalam waktu yang sama, kita perlu menjelaskan bagaimana akumulasi primitif melalui kolonialisme telah menyumbang terhadap kelahiran dan perkembangan kapitalisme secara khusus di dalam teritori tertentu di kepulauan nusantara. Tentu saja, kita perlu menimbang distorsi dan duplikasi praktik ini sebagaimana terjadi di belahan dunia lain. Tetapi secara umum, dapat dikatakan bahwa melalui perdagangan, perbudakan, kontrol terhadap penggunaan tanah, strategi pengerukan pajak, dan kekerasan adalah mekanisme-mekanisme yang dipilih kekuatan-kekuatan kolonial untuk menumpuk uang sebagai modal dalam investasi usaha-usaha produktif yang kapitalistik. Dengan memberikan perhatian spesifik terhadap Sulawesi Tengah, tulisan ini memotret pengalaman empirik akumulasi primitif terhadap sebuah daerah yang, oleh antropolog Tania Murray Li sudah menyatakan di berbagai kesempatan, sudah mengalami dinamika perubahan dan mobilitas penduduk sedemikian kompleks sejak era kolonialisme.<sup>32</sup>

Sejak akumulasi primitif berkaitan dengan proses penghancuran masyarakat lama, maka penjelasan tentang tipe atau ciri masyarakat itu menjadi penting. Sebelum kedatangan Belanda dan bahkan sesudahnya, masyarakat pra kapitalis di kepulauan nusantara memiliki kombinasi antara tiga ciri utama sebagai berikut. *Pertama*, ciri komunalisme agraris, di mana komunitas mengontrol dan memanfaatkan *tanah* sebagai sumber penghidupan utama mereka. Sifat komunalisme ini juga tercermin di dalam pertukaran *kerja* antar anggota komunitas. Studi Albert Schrauwers tentang Pamona di Sulawesi Tengah merupakan salah satu contoh tentang gambaran pertukaran tenaga kerja ini.<sup>33</sup> Tetapi, dalam skala lebih luas, komunitas-komunitas ini tunduk secara politik kepada kerajaan-kerajaan agraris tertentu. Oleh karena itu, kendati di dalam masyarakat komunal itu kemungkinan sudah muncul *diferensiasi* dan karenanya pengerukan surplus kerja, tetapi dapat dipastikan bahwa surplus kerja dari komune-komune itu mengalir ke raja-raja yang menguasai mereka. Seperti ditemukan secara umum di berbagai kepulauan nusantara, mereka membayar upeti, terutama dalam bentuk barang, sebagai wujud ketundukan.<sup>34</sup> Misalnya, di Sulawesi Tengah, dalam catatan pastor asal Spanyol, Domingo Navarette, yang mengunjungi Tanah Kaili, Lembah Palu, pada 1657, sudah menyebut penduduk di sana membayar upeti tahunan dalam bentuk minyak kelapa kepada Makassar di Sulawesi Selatan pada abad itu.<sup>35</sup> Dalam skala lebih terbatas, *To Wana* menyerahkan upeti kepada kerajaan-kerajaan terdekat secara geografi, Raja Bungku dan Raja Tojo.<sup>36</sup> Karena di Sulawesi Tengah, pada umumnya para raja

---

<sup>32</sup> Tania Murray Li, dengan argumentasi geografi yang kuat, sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang potret daerah ini di bawah tesis tentang 'perubahan' dan 'mobilitas penduduk'. Lihat Tania Murray Li, "Local Histories, Global Markets: Cocoa and class in upland Sulawesi", *Development and Change* 33 No 3 (2002); Tania Murray Li, "Reflections on Indonesian violence: Two tales and three silences", *Socialist Register* 2009 (2009); Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, development, and the practice of politics*, (Durham, London: Duke University Press, 2007), 61-76.

<sup>33</sup> Albert Schrauwers, "Let's Party: State intervention, discursive traditionalism and the labour process of highland rice cultivators in Central Sulawesi", *The Journal of Peasant Studies*, 25 No 3 (1998).

<sup>34</sup> Pola paling umum, mungkin sesuai seperti yang disebut Alec Gordon, di mana para raja mengeruk surplus dari rakyatnya melalui upeti dalam bentuk hasil pertanian atau dengan bekerja di lahan pertanian raja. Lihat Alec Gordon, "Stages in the Development of Java's Socio-economic Formation 700-1979", *Journal of Contemporary Asia* 9 No 2 (1979), 130.

<sup>35</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever: Population, economy and environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*, (Leiden: KITLV, 2005), 77.

<sup>36</sup> Jane Monnig Atkinson, *The Arts and Politics of Wana Shamanism*, (Berkeley, Los Angeles, Oxford: University



juga merupakan pedagang, maka mereka mengeruk surplus melalui perdagangan dan upeti (pajak) secara tumpang tindih. Pada akhir abad 19, raja Tojo menampakkan diri sebagai pedagang dari pada seorang raja. Sang raja melakukan perdagangan dengan suku-suku pedalaman di wilayah kekuasaannya dengan mengeruk surplus dari perdagangan. Begitu juga, karena statusnya, para pemimpin politik lama di Banggai dan Bungku membeli semua barang di bawah harga sebagai salah satu bentuk pajak. Perdagangan dan pajak tidak begitu berbeda sebagai mekanisme pengerukan surplus kerja. Bahkan, pelayanan kerja kepada para pemimpin politik kerap dibayar dalam bentuk barang dagangan.<sup>37</sup>

*Kedua*, ciri lain yang menonjol adalah interaksi antara negara-negara lama di nusantara melalui hubungan dominasi dan subordinasi yang rumit. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kerajaan-kerajaan itu mengeruk surplus dari rakyatnya melalui penguasaan politik. Tetapi, investigasi yang penting adalah dengan melihat dominasi dan subordinasi antara kerajaan-kerajaan. Kita kenal, di masa prakolonial, misalnya, Majapahit adalah salah satu negara lama paling utama pada abad 14 dan 15 dan kerap dianggap mengontrol areal yang luas dan memonopoli perdagangan di kepulauan nusantara.<sup>38</sup> Di Sulawesi Tengah, Banggai adalah sebuah kerajaan penting dan sejak abad 14 mengontrol perdagangan biji besi yang bersumber dari wilayah Bungku.<sup>39</sup> Sementara kerajaan Bungku pada masa itu tunduk dengan menyerahkan upeti kepada Banggai. Tetapi, Banggai sendiri juga tunduk dan menyerahkan upeti kepada Majapahit. Daerah Bungku kemudian berada di bawah kontrol Ternate pada abad 16.<sup>40</sup> Pada paruh kedua abad 17, kerajaan Bone juga membangun koloni di Sulawesi Tengah, berhubungan kuat dengan Raja Tojo di Teluk Tomini, setelah penaklukan Makassar, pada 1668.<sup>41</sup> Kerajaan Luwu mengontrol daerah-daerah dataran tinggi di sekitar Danau Poso.<sup>42</sup> Negara-negara itu memperoleh upeti sebagai wujud ketundukan dari negara-negara subordinatnya atau masyarakat di wilayahnya.

*Ketiga*, perbudakan dan perdagangan budak menyebar luas di dalam masyarakat lama Indonesia. Penulis Portugis, Tomé Pires, yang mengunjungi kepulauan nusantara, pada 1515, menyebut praktik perbudakan dikenal luas di berbagai pulau.<sup>43</sup> Sejarawan Anthony Reid mencatat praktik perbudakan berlangsung di berbagai wilayah kepulauan nusantara sebelum kedatangan Belanda. Secara umum, ada berbagai mekanisme menjadi budak seperti karena lahir dari orang tua seorang budak, penjualan (oleh orang tua, suami, atau dirinya sendiri), tertangkap dalam perang, hukuman karena tidak taat pajak kepada raja, dan gagal

---

of California Press, 1989), 188.

<sup>37</sup> David Henley, *Fertility, Food and Fever*, 76-7.

<sup>38</sup> Lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia: c. 1300 to the present*, (London and Basingstoke: MacMillan Press Ltd, 1981), 14-9.

<sup>39</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 71.

<sup>40</sup> Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, (New Haven and London: Yale University Press, 1988), 110.

<sup>41</sup> Albert Schrauwers, "In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central Sulawesi", (PhD Diss., University of Toronto, 1995), 65.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 42-3.

<sup>43</sup> Lihat Peter Boomgaard, "Human Capital, Slavery and Low Rates of Economic and Population Growth in Indonesia 1600 - 1910", *Slavery & Abolition* 24 No 2 (2003), 84.

membayar utang.<sup>44</sup> Dalam kasus Sulawesi Tengah, praktik perbudakan ditemukan dalam masyarakat lama berbasis perladangan. Di Poso, misalnya, kendati tidak semua masyarakat lama di sana memiliki budak, beberapa suku kecil seperti *To Lage*, *To Ondae*, *To Palande*, *To Pada*, *To Pebato* dan *To Pu'u* – mboto terbagi ke dalam dua kelas: *watua* (budak) dan *kabosenya* (orang bebas dan besar). Para budak itu berasal dari garis keturunan dan dari hasil tangkapan dari suku lain.<sup>45</sup> Schrauwers, mengutip Adriani dan Kruyt, menyebut bahwa para *kabosenya* menggunakan para budak untuk mengumpulkan rotan dan damar untuk diperdagangkan di daerah pesisir untuk membeli pakaian.<sup>46</sup> Kendati secara resmi, Belanda sudah melarang perbudakan hampir 50 tahun sebelumnya, tetapi hingga 1907, praktik-praktik perbudakan belum dilarang di Sulawesi Tengah.<sup>47</sup>

Meskipun, sebagian dari ciri-ciri masyarakat lama di atas masih ditemukan jauh setelah berakhirnya kolonialisme, tetapi bagaimanapun kolonialisme selain memanfaatkan juga secara berlahan telah menghancurkan bangunan politik dan ekonomi masyarakat lama di kepulauan nusantara untuk kepentingan politik dan ekonominya. Kita mencatat, kolonialisme telah terbukti menjadi senjata untuk mengeruk kekayaan berbasis kekerasan paling brutal dalam sejarah modern Indonesia. Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), 1619-23 dan 1927-29, menegaskan pentingnya kaitan antara kekerasan dan akumulasi kekayaan itu sebagai berikut: “they could have neither trade without war nor war without trade”.<sup>48</sup> Belanda mengeruk kekayaan berbasis kekerasan melalui monopoli perdagangan, pajak dan atau upeti dalam bentuk barang dagangan, keharusan penanaman tanaman-tanaman ekspor, dan penggunaan tenaga kerja paksa terutama dalam aktivitas produksi. Paling tidak di abad kedelapan belas, VOC dengan memonopoli perdagangan Indonesia menjadi salah satu pilar utama ekonomi Belanda. Kehadirannya terutama bersandar kepada kemampuan militer, khususnya angkatan laut, sebelum akhirnya bangkrut menyusul perang Belanda dengan Inggris. Implikasinya, terjadi krisis ekonomi yang meruntuhkan Amsterdam sebagai pusat keuangan, lantas berpindah ke London.<sup>49</sup> Di luar era VOC, hanya dalam periode 1831-1877, Belanda mengeruk surplus atau “surplu kolonial” dari kepulauan nusantara mencapai 3,02 milyar gulden atau setara dengan USD 23,6 milyar pada 2007. Dalam periode 1878-1941, perampasan surplus itu mencapai 54 milyar gulden atau setara dengan USD 5,2 trilyun untuk nilai indeks harga konsumen di Belanda pada 2011.<sup>50</sup> Jelas, surplus itu dikeruk lewat limpahan darah dan air mata. Sebuah

---

<sup>44</sup> Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, 129-36.

<sup>45</sup> Richard Erskine Downs, “The Religion of the Bare'e-speaking Toradja of Central Celebes”, (Doctoral Diss., 1956), 6-7.

<sup>46</sup> Albert Schrauwers “H(h)ouses, E(e)states and class: On the important of capitals in Central Sulawesi”, *BKI* 160-1 (2004), 89

<sup>47</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 216.

<sup>48</sup> Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, 27.

<sup>49</sup> Lihat J.L. van Zanden and A. van Riel, *The Stricture of Inheritance: The Dutch economy in the nineteenth century* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004), 73-84.

<sup>50</sup> Lihat Alec Gordon, “Lies, Damned and Statistics: Calculating the size of Indonesia's colonial surplus in Cultivation System, 1831-1877”, *Asian Journal of Social Science* 38 (2010); Alec Gordon, “How Big was Indonesia's “Real” Colonial Surplus in 1878-1941?”, *Journal of Contemporary Asia* 42 No 4 (2012); Bandingkan juga Angus Maddison, “Dutch Income in and from Indonesia 1700-1938”, *Modern Asian Studies* 23 No 4 (1989).

kalkulasi kasar menyebutkan bahwa sejak kehadiran VOC, jumlah penduduk yang mati di kepulauan nusantara karena kekerasan brutal Belanda berkisar antara 500.000 – 1.000.000 orang.<sup>51</sup>

Di kepulauan nusantara, sejak kehadirannya, melalui VOC dan kemudian administrasi pemerintahan kolonial, struktur masyarakat lama di kepulauan nusantara secara perlahan dihancurkan atau disesuaikan dengan kebutuhan kolonial. Salah satu yang dipertahankan adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja tidak bebas (*unfree labour*). Di era kolonial, kerja paksa (*forced labour*) telah menjadi kunci kejayaan merkantilisme dan kemudian kapitalisme di Belanda dan Eropa secara umum.<sup>52</sup> Di antara penggunaan tenaga kerja tidak bebas yang menonjol adalah perbudakan. VOC, bekerja sama dengan raja-raja lokal, terlibat atau mensponsori perdagangan dan pencurian manusia untuk dijadikan budak, dengan mengeksploitasi mereka untuk mengeruk surplus tenaga kerja.<sup>53</sup> Perdagangan para budak itu dipasok dari berbagai sumber seperti mereka yang lahir dari orang tua seorang budak, ketidak-mampuan membayar utang, hukuman karena tindak kriminal, dan orang-orang yang ditangkap karena perang dan perburuan.<sup>54</sup> Batavia merupakan salah satu pusat konsentrasi budak pada 17 dan abad 18. Para budak pada umumnya didatangkan dari Makassar, Bali, Bugis, Mandar, Lombok, Sumbawa, Buton,<sup>55</sup> dan juga kemungkinan dari Buol, yang menurut sumber VOC merupakan sumber ekspor budak.<sup>56</sup> Di Batavia dan kota-kota lain, VOC mempekerjakan para budak sebagai tukang kayu (kapal dan rumah), pandai besi, tukang batu, pekerja pengecoran, dll.<sup>57</sup> Pengalaman praktik perbudakan paling brutal terjadi di perkebunan pala milik VOC di Banda, Maluku. Praktik ini didahului dengan pembunuhan mayoritas penduduk di kepulauan dengan penduduk sekitar 15.000 itu, pada 1621. Mereka yang lolos dari pembantaian dipaksa menjadi budak bersama-sama dengan ribuan budak lain yang didatangkan melalui perdagangan dari daerah lain (Makassar dan Seram) di perkebunan di sana, dengan kondisi sangat buruk. Ekonomi perkebunan berdasarkan perbudakan di kepulauan ini,<sup>58</sup> tampak merupakan sedikit contoh tentang Belanda yang mengeksploitasi budak dalam sektor produktif, dibanding memperdagangkan

---

<sup>51</sup> Lihat Remco Raben "On Genocide and Mass Violence in Colonial Indonesia", *Journal of Genocide Research* 14 No 3-4 (2012), 487.

<sup>52</sup> Lihat van Zanden and van Riel, *The Stricture of Inheritance*, 73-84.

<sup>53</sup> Lihat Markus Vink, "The World's Oldest Trade: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century", *Journal of World History*, 14 No 2 (2003); H. Sutherland, "Slavery and the Slave Trade in South Sulawesi, 1660s – 1800s", in Anthony Reid, ed., *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia* (St. Lucia, London, New York: University of Queensland Press, 1983).

<sup>54</sup> Gerrit J. Knaap "Slavery and the Dutch in Southeast Asia", in Gert Oostindie (ed.). *Fifty Years Later: Antislavery, Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995), 197; Vink, "The World's Oldest Trade: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century", 153-4.

<sup>55</sup> Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 276-80; Vink, "The World's Oldest Trade: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century", 143-4.

<sup>56</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 217.

<sup>57</sup> Boomgaard, "Human Capital, Slavery and Low Rates of Economic and Population Growth in Indonesia, 1600-1910", 85.

<sup>58</sup> Pada 1681, jumlah budak di kepulauan Banda mencapai 3.314 jiwa – anak-anak (9%), perempuan (46,7%) dan laki-laki (44,3%). Lihat J.L. van Zanden, *The Rise and Decline of Holland's Economy: Merchant capitalism and the labour market*, (Manchester and New York: Manchester University Press, 1993), 75-9.

budak sebagai karakter utamanya.<sup>59</sup>

Perbudakan di atas kertas dilarang di Pulau Jawa pada 1860, kendati masih terus terjadi di luar Jawa.<sup>60</sup> Pelarangan ini mesti diletakkan dalam skala secara lebih luas sebagai buah dari perjuangan kelas untuk mengakhiri perbudakan dalam eksploitasi kolonial di belahan dunia non-Eropa.<sup>61</sup> Revolusi kaum budak dalam skala besar terjadi di perkebunan-perkebunan Belanda di Karibia, pada 1795, yang kemudian berdampak pada pelarangan budak oleh Belanda yang berlangsung secara bertahap di seluruh koloninya, termasuk di kepulauan nusantara. Tetapi, strategi mengakhiri perbudakan, menyusul revolusi budak di Karibia, tampaknya dibayar mahal dengan pengenalan model kerja paksa (*coerced labour*) untuk mengeruk surplus kerja yang besar, melalui sistem Tanam Paksa di Jawa.<sup>62</sup> Konteks lain dari penerapan Tanam Paksa adalah keberhasilan revolusi Belgia pada 1830, sehingga mengakhiri sumber penerimaan pajak yang besar bagi Belanda. Apalagi kegagalan perang untuk mengembalikan Belgia dan perang di Jawa (1825-30) melambungkan nilai utang Belanda. Tanam Paksa sebagai strategi untuk mengeruk surplus kolonial (*colonial surplus*) yang besar menjadi kompensasi bagi Belanda karena kehilangan sumber penerimaan pajak dan belitan utang.<sup>63</sup> Sistem Tanam Paksa merupakan contoh klasik dari artikulasi kapitalisme dagang dengan sebuah corak produksi pra-kapitalis, di mana intensifikasi produksi secara besar-besaran untuk pasar dunia difasilitasi melalui kerja paksa kepada para petani di atas tanah milik mereka sendiri.

#### a) Penguasaan politik Sulawesi Tengah

Penempatan Sulawesi Tengah ke dalam genggamannya kontrol Belanda di Hindia Timur bergerak dari dua titik, Makassar di Sulawesi Selatan dan Ternate di Halmahera. VOC bersekutu dengan Ternate dalam ekspansinya ke Teluk Tomini di bagian Utara Sulawesi pada 1647, dengan mendirikan benteng di Manado. Selama Ternate menjadi sekutu Belanda, Makassar (Goa) adalah rival dalam perdagangan rempah-rempah. VOC lantas masuk dalam sebuah aliansi dengan Arung Palakka, Raja Bone di Sulawesi Selatan, dan kemudian menaklukkan Makassar, pada 1668. Meskipun VOC menduduki Makassar, Bone bebas

---

<sup>59</sup> Menurut Ellen Meiksins Wood, sebelum kelahiran kapitalisme, Belanda diketahui sebagai sebuah masyarakat dengan perdagangan yang maju lebih mengeruk keuntungan dari perdagangan budak dibanding eksploitasi mereka di sektor produktif seperti di perkebunan. Lihat Ellen Meiksins Wood, *Empire of Capital* (London & New York: Verso, 2005), 61.

<sup>60</sup> Mengenai pelarangan perbudakan di pulau Jawa lihat Knaap, "Slavery and the Dutch in Southeast Asia".

<sup>61</sup> Mengenai larangan perbudakan dalam konteks perjuangan kelas, diargumentasikan dengan kuat oleh sejarawan Marxist Robin Blackburn yang menolak anggapan bahwa pertumbuhan kapitalisme secara langsung mendorong lahirnya larangan perbudakan, dan menganggap bahwa sistem penghisapan tenaga kerja model ini hancur sebagai buah dari perjuangan kelas. Lihat R. Blackburn, *The Overthrow of Colonial Slavery 1776 - 1848*, (London and New York: Verso, 1990).

<sup>62</sup> S. Drescher, "The Long Goodbye: Dutch capitalism and antislavery in comparative perspective", in G. Oostindie. *Fifty Years Later: Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch Orbit*.

<sup>63</sup> Keberhasilan revolusi Belgia mengakhiri sumber penerimaan Belanda yang besar. Pajak yang diterima Belanda dari Belgia antara 1821 - 1830 bernilai 270 juta gulden, dibanding penerimaan dari Jawa sebanyak 25 juta gulden. Sementara kegagalan perang untuk mengembalikan Belgia menimbulkan utang sebanyak 300 juta gulden dan perang di Jawa menghabiskan utang sebanyak 30 juta gulden. Lihat Gordon, "Lies, Damned and Statistics: Calculating the size of Indonesia's colonial surplus in the Cultivation System".

memperluas kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Bone juga membangun koloni di Sulawesi Tengah, berhubungan kuat dengan Raja Tojo di Teluk Tomini. Pada saat Makassar hancur, VOC mengakhiri aliansinya dengan Ternate dan mencoba membangun kekuasaan. Pada saat Ternate berontak, 1678 - 1682, Belanda menghukum Ternate dengan mengambil alih kontrol atas Teluk Tomini di Sulawesi bagian Utara. Pada akhir abad 17, VOC memonopoli perdagangan di seluruh Sulawesi.<sup>64</sup>

Setelah kebangkrutan VOC, pada 1798, pemerintahan Hindia Timur bermaksud melakukan perubahan radikal di Jawa. Sebaliknya, di luar Jawa, Belanda meneruskan tradisi VOC dengan mengembangkan monopoli perdagangan melalui perjanjian-perjanjian. Langkah perdagangan ini memanas selama abad 19. Karena ketidak-stabilan sistem meningkat tajam, maka terjadi peningkatan serangan-serangan Belanda yang bersifat menghukum, untuk memperoleh kembali kontrol. Belanda menaklukkan bekas sekutunya, Bone, pada 1859. Juga, untuk memelihara monopoli perdagangan tanpa kehadiran pemerintahan secara langsung (*direct rule*), Belanda melakukan serangkaian perang terhadap pemerintahan pribumi lokal di seluruh pulau, lantas mengonsolidasi pemerintahan melalui perjanjian-perjanjian. Pada akhir abad 19, perjanjian-perjanjian yang ditanda-tangani antara Belanda dengan pemerintahan asli (lokal) di seluruh Sulawesi berbentuk tiga model. *Pertama*, "tanah-tanah pemerintah" seperti Makassar diperintah secara langsung (*directly ruled*) oleh Belanda. *Kedua*, negara-negara sekutu seperti Bone, yang menandatangani "Perjanjian Bungaya" dan membantu Belanda menaklukkan Makassar, diperintah secara tidak langsung (*indirectly ruled*) dan; *ketiga*, 'tanah-tanah feodal' di mana kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian individual ditanda-tangani.<sup>65</sup>

Sulawesi Tengah masuk dalam kategori jenis kontrak yang terakhir. Daerah sekitar Teluk Tomini - dan setelah itu umumnya menjadi bagian dari Sulawesi Tengah - berada di bawah kontrak antara pemerintah pribumi dan Belanda, dengan maksud ganda, membangun kekuasaan Belanda dan mengatur perdagangan tanpa keterlibatan pemerintah Belanda secara langsung. Nanti pada akhir abad 19, Sulawesi Tengah kemudian dimasukkan ke dalam kekuasaan langsung Belanda. Ini terjadi karena dipicu oleh ketakutan akan kehilangan wilayah yang secara potensial dapat dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan imperialis lainnya, terutama Inggris dan Australia.<sup>66</sup> Jauh sebelum itu, Lembah Palu sudah menjadi pusat perdagangan penting di Sulawesi Tengah sebelum kedatangan pemerintahan Belanda, di mana armada kapal-kapal VOC telah mengunjungi Palu sebelum 1800. Bahkan tentara VOC sudah dikirim melintasi Lembah Palu dan Teluk Tomini, pada 1681. Tetapi, nanti, pada 1824, perwakilan-perwakilan dari Kerajaan Banawa dan Palu menanda-tangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, Belanda tidak mendirikan pos administrasi secara permanen di Lembah Palu hingga 1891.<sup>67</sup> Begitu juga, kendati perjalanan eksplorasi ke Danau Poso telah dilakukan oleh pegawai-pegawai sipil Belanda, masing-masing J.C.W.D.A van der Wijck, pada 1865, dan W.J.M. Michielsen, pada 1869, tetapi tidak ada pos permanen di

---

<sup>64</sup> Albert Schrauwers, "In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central Sulawesi", 65.

<sup>65</sup> Ibid.,

<sup>66</sup> Ibid., 66.

<sup>67</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 232-3.

kawasan ini.<sup>68</sup> Sulawesi Tengah pada umumnya, merupakan daerah pinggiran bagi pemerintahan Hindia Belanda hingga menjelang abad 20.

Poso, barangkali, merupakan contoh tepat tentang kehadiran pemerintah Belanda secara langsung di daerah ini. Kehadiran pemerintah Belanda di Poso bermula pada akhir abad 19. Pada 1894, Belanda menempatkan seorang *controleur* (kepala distrik) pertama di Poso, yang dikenal sebagai pos perdagangan di pesisir saat itu. Poso merupakan tempat kantor bea cukai untuk memungut pajak dari volume perdagangan yang tumbuh cepat antara penduduk setempat dengan pedagang-pedagang China. Pada 1902, Belanda menaikkan status Poso menjadi Asisten Residen, dengan menunjuk A.J.M. Engelenberg sebagai administratornya. Engelenberg sendiri adalah seorang administatur yang sangat berpengalaman dan terlibat dalam penaklukan Lombok, 1894-1895. Dengan demikian, penunjukan dirinya mencerminkan sebuah pandangan resmi pemerintah Belanda tentang kepentingan wilayah ini dalam regim kolonial yang baru.<sup>69</sup> Sejak awal abad 20 Poso dan Sulawesi Tengah pada umumnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam kontrol efektif pemerintah Hindia Belanda. Setelah 1905, pemerintah Hindia Timur Belanda memberikan ruang gerak kepada pemerintahan pribumi lokal sepanjang mereka dapat mengontrolnya. Terhadap pemerintahan lokal ini, Belanda menerapkan penguasaan melalui Perjanjian Singkat (*Korte Verklaring*).<sup>70</sup> Pada 1904, Raja Sigi menandatangani *Korte Verklaring*, kemudian menyusul Palu dan Dolo, pada tahun berikutnya.<sup>71</sup>

Tetapi, kehadiran Belanda di Sulawesi Tengah pada umumnya berlangsung melalui penaklukan secara militer. Karena, daerah ini adalah salah satu daerah di luar Jawa yang menjadi sasaran utama ekspedisi militer, untuk perluasan otoritas pemerintahan Belanda di kepulauan nusantara.<sup>72</sup> Awalnya, Residen Manado mengorganisir dua serangan ke dataran tinggi, dari Poso di Utara dan Wotu di Selatan, lalu bertemu di Danau Poso. Ekspedisi militer ini mencapai Danau Poso, 29 Oktober 1905. Pada 11 November 1905, seluruh *Kabosenya* di sekeliling Danau Poso diundang menghadiri pertemuan untuk mendengar pembacaan surat dari *Datu* Luwu yang melepaskan seluruh haknya atas daerah itu. Khusus Poso, pada Januari 1906, “ketenangan dan ketertiban” terbangun di dataran tinggi, dengan ratusan korban di antara penduduk pribumi.<sup>73</sup> Ekspedisi ke dataran tinggi Poso ini dilakukan setelah Belanda

---

<sup>68</sup> Schrauwers, “In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central Sulawesi”, 66.

<sup>69</sup> [Joost Coté](#), “Colonising Central Sulawesi: The ‘Ethical Policy’ and Imperialist Expansion, 1890-1910”, *Itinerario*, Volume XX No 3 (1996), 93-4.

<sup>70</sup> Schrauwers, “In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central Sulawesi”, 67; *Korte Verklaring* adalah sebuah kesepakatan standar dan singkat yang di dalamnya seorang penguasa Indonesia mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Timur Belanda dan setuju menerima perintah-perintahnya. Kesepakatan model ini pertama kali diperkenalkan di Aceh pada 1898 dan sesudah itu menjadi bentuk standar perjanjian di seluruh Nusantara. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2005), 313.

<sup>71</sup> Robert Weber, Werner Kreisel and Heiko Faust, “Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”: The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942”, *Asian Journal of Social Science*, 31 No 3 (2003), 411.

<sup>72</sup> Lihat H.V. Van Den Doel, “Military Rule in the Netherlands Indies”, in Robert Cribb ed, *The Late Colonial State: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, (Leiden: KITLV, 1994), 64-8.

<sup>73</sup> Schrauwers, “In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central

menaklukkan Bone dan Luwu, karena menolak kontrak baru.<sup>74</sup> Ironis, ekspedisi militer ini berlangsung di bawah periode Politik Etis, di mana bukan eksploitasi, tetapi peningkatan moral dan material “pribumi” yang menjadi tema dominan. Dengan kata lain, kehadiran Belanda yang berlangsung di bawah slogan “tanggung jawab moral” Belanda terhadap Sulawesi Tengah, ternyata didahului dengan serangkaian serangan-serangan militer.

Ekspedisi militer Belanda telah mengundang sejumlah perlawanan berdarah di Sulawesi Tengah. Di tanah Mori, terjadi perang dengan Belanda pada 1907. Perang ini dikenal dengan perang Wulanderi, yang dipicu oleh kerja paksa pembuatan jalan sekitar 100 km dari Matandao ke Danau Lowo, Tetebengka, Kalengko, Tompira dan Dongi. Perang penting lain terjadi di Lembah Napu, Poso. Pada 1905, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan H.J. Voskuil dikirim ke wilayah itu. Pengiriman pasukan ini menyusul penolakan dua kepala suku, *To Napu* dan *To Pebato*, yang diundang menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Engelenberg untuk menjelaskan tentang regim pemerintahan baru. Dari perang ini, 60 *To Napu* tewas,<sup>75</sup> termasuk Umana Soli, kepala suku yang memimpin pertempuran terhadap Belanda. Kelak, pertempuran ini dikenang sebagai Perang Piore. Kekerasan juga dilaporkan terjadi di wilayah *To ondae* dan *To Pebato*. Ekspedisi militer di Sulawesi Tengah antara 1905 - 1907 memakan korban lebih dari 300 orang tewas. Di wilayah Poso, selain Napu, tercatat 38 orang mati dan 50 orang terluka, Mori sekitar 100 orang mati, dan di Lembah Palu sekitar 60 orang mati.<sup>76</sup> Kekerasan politik berdarah-darah bisa diperpanjang setelah ekspedisi itu. Pertengahan 1919, di Toli-toli, pemberontakan rakyat menolak kerja paksa mengakibatkan terbunuhnya De Kat Angelino, *controleur* Belanda. Pembunuhan itu dikaitkan dengan kunjungan Abdul Muis, tokoh Sarekat Islam, ke wilayah itu sebulan sebelumnya.<sup>77</sup>

## b) Kepentingan ekonomi

Seperti sudah disampaikan, Sulawesi Tengah dimasukkan ke dalam kekuasaan langsung Hindia Timur di bawah terminologi ‘Politik Etis’. Belanda mulai memperhatikan Sulawesi Tengah karena rumor tentang kekayaan biji besi, batubara, dan hasil-hasil hutan. Para pengusaha Eropa tidak dapat memasuki wilayah ini tanpa kehadiran pemerintah Belanda. Para pejabat lokal Belanda menganggap bahwa kehadiran pemerintahan kolonial di sana dapat dibiayai dari pertumbuhan penerimaan pemerintah melalui pajak dari aktivitas ekonomi. Secara signifikan, laporan pejabat lokal itu menyatakan bahwa dalam hubungan dengan retorika ‘etik’, kehadiran kolonial akan membawa suatu situasi yang sangat berbeda, di mana usaha-usaha pertanian dan eksploitasi tambang menjadi mungkin, yang pada gilirannya akan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Ini memang merupakan bagian dari Politik Etis, kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan atau modernisasi masyarakat

---

Sulawesi”, 69; Albert Schrauwers, *Colonial ‘Reformation’ in the Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2000), 47-8.

<sup>74</sup> Schrauwers, “In Whose Image? Religious Rationalization and the Ethnic Identity of the To Pamona of Central Sulawesi”, 68; Dik Roth, “Ambition, Regulation and Reality, Complex Use of Land and Water Resources in Luwu, South Sulawesi, Indonesia”, (Ph.D.dissertation, Wageningen University, 2003), 40.

<sup>75</sup> Schrauwers, *Colonial ‘Reformation’ in the Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, 47.

<sup>76</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 257.

<sup>77</sup> Ruth McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, (Jakarta, Singapore: Equinox Publishing, 2006), 40.

Meskipun demikian, dibanding daerah-daerah lain, di mana perhatian dan kontrol kolonial terhadap usaha-usaha berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan sudah mengalami perkembangan sedemikian jauh,<sup>79</sup> Sulawesi Tengah relatif tidak memperoleh perhatian. Belanda mulai memperhatikan Sulawesi Tengah dengan sungguh-sungguh sejak awal abad lalu. Ekspansi imperialis ke dataran tinggi, terutama di Poso, dengan motif ekonomi (pertambangan emas) dan alasan politik (menerapkan sistem pajak dan mencegah klaim oleh kekuatan kolonial lain), seperti telah dijelaskan bermula dengan ekspedisi militer di bawah justifikasi 'tanggung jawab etis'. Pada akhir abad 19, pertambangan telah menjadi salah satu daya tarik utama kepentingan ekonomi asing di Sulawesi Tengah. Beberapa abad sebelumnya, banyak catatan menunjukkan bahwa di Sulawesi bagian Tengah, kawasan sekitar Danau Matano, merupakan sumber besi dengan kadar nikel yang kaya (*nickel-rich iron*), digunakan dalam pembuatan keris Majapahit.<sup>80</sup> Robert Padtbrugge, seorang administrator VOC, Gubernur Ternate (1677-1682), yang pernah mengunjungi daerah itu, menyatakan pegunungan di belakang pemukiman Orang Bungku, daerah Morowali, kaya dengan biji besi dan logam. Berabad-abad daerah ini menyuplai alat-alat dan senjata-senjata dari besi ke bagian lain Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Dalam *Nagarakartagama* dan sumber-sumber China menyebut Kerajaan Banggai mengontrol perdagangan besi di wilayah itu pada abad 14.<sup>81</sup> Pada 1730-an, perdagangan emas di Buol dan Toli-toli berlangsung di bawah kontrol VOC yang sudah memiliki pos di kedua wilayah itu. Pada pertengahan abad 18, di Lembunu, dekat ke Moutong, dan di Parigi, juga terdapat pos-pos VOC, sebagai tempat pengumpulan emas. Pada masa itu, dari wilayah-wilayah ini hingga Gorontalo merupakan sumber utama emas.<sup>82</sup> Sejak akhir abad 19, perhatian terhadap potensi tambang di Sulawesi Tengah meningkat. Sejumlah tim eksplorasi Eropa dan Australia melakukan investigasi di wilayah ini, kendati pemerintah Belanda tidak dapat menjamin keamanan orang asing. Pada 1890, penyelidik emas Australia melakukan eksplorasi di bagian selatan Teluk Tomini tanpa izin dari pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang klaim kolonial lain terhadap kawasan ini.<sup>83</sup> Dua peneliti terkenal dari Swiss, P. dan F. Sarasin pada pada 1902, melakukan perjalanan melintasi

<sup>78</sup> Cote, "Colonising Central Sulawesi: The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion, 1890-1910".

<sup>79</sup> Di Minahasa, pada pertengahan abad 19, negara kolonial memaksa penduduk untuk menanam kopi. Pada 1865, jumlah kopi yang ditanami warga sudah mencapai 6,4 juta pohon. Pada abad sebelumnya, di bawah kontrol VOC, kegiatan penambangan emas sudah berlangsung dengan masif. Di Gorontalo, dalam periode 1737-1778, VOC mengeksport emas rata-rata 50 kg setiap tahun dari tambang-tambang emas yang mempekerjakan banyak penambang di sana. Dalam periode 1820-1848, ekspor emas dari wilayah ini hanya sekitar 20 kg setiap tahun. Dilaporkan banyak pekerja tambang yang menderita malaria dan meninggal dunia di lokasi-lokasi pertambangan emas. Pada awal abad 19, di Paguat, sebuah lokasi penambangan di sana para penambang tersiksa oleh iklim kerja yang buruk. Dilaporkan, pada Maret dari 800 orang di Gorontalo yang pergi bekerja di lokasi tambang itu, hanya sekitar 200 orang masih terus bekerja, 260 orang mati, 200 sakit, dan 140 orang melarikan diri. Lihat Henley, *Fertility, Food and Fever*, 93-8, 269-70.

<sup>80</sup> Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 volume one*, 110.

<sup>81</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 70-1.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 71, 213, 216, 218.

<sup>83</sup> Kathryn Robinson, *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*, (Albany: State University of New York Press, 1986), 70; Schrauwers, *Colonial 'Reformation' in the Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, 46.



Sulawesi dari Palu di Utara menuju Palopo di Selatan. Sebelumnya, pada 1896, keduanya juga melintasi wilayah Kerajaan Mori, dari Danau Matano ke Sungai La.<sup>84</sup> Kemudian Geolog Belanda, E.C. Abendanon melakukan penyelidikan di Sulawesi Tengah. Dia berangkat dari Selatan, dan pergi menuju bagian Utara ke Bada.<sup>85</sup> Dari investigasinya di daerah pedalaman bagian timur Sulawesi pada 1909 dan 1910, Abendanon menyatakan bahwa biji besi dan nikel ditemukan di wilayah ini. Dalam laporannya, ia merekomendasikan sebuah survey yang sistematik.<sup>86</sup> Pada 1911, dengan kepentingan yang sama, seorang Jerman, Prof. A.Grubauer melakukan perjalanan dari Poso ke Napu, Besoa, Bada, kemudian ke Gimpu, Kulawi, Lindu dan Palu.<sup>87</sup> Tetapi, sejak awal abad lalu, tidak ada kegiatan ekstraksi mineral modern oleh kekuatan asing selama pendudukan Belanda.

Produksi pertambangan modern di daerah bermula di era pendudukan Jepang. Jepang melirik Sulawesi Tengah sebagai alternatif sumber mika. Sebab, pada masa perang itu, mereka kehilangan akses untuk memperoleh suplai mika dari luar negeri untuk keperluan militer. Kegiatan penambangan mika, jenis *muscovite*, berbasis *unfree labour* terjadi di daerah sekitar dataran tinggi Kulawi, kini bagian dari Kabupaten Sigi. Sejak proses seleksi dan ekstraksi mika memerlukan penggunaan tenaga kerja yang banyak, maka di bawah pendudukan Jepang, para petani peladang dari berbagai desa, dari Banggaiba hingga Pipikoro dipaksa untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan mika. Serdadu Jepang mengontrol para pekerja di sana dengan kekerasan. Setiap bulan 100 orang pekerja (lelaki dan perempuan), 10 orang dari setiap desa, dikerahkan ke Towulu untuk bekerja selama 9 jam setiap hari. Selama dua setengah tahun pendudukan Jepang, sejumlah warga desa dilaporkan terbunuh oleh serdadu Jepang. Banyak orang meninggal di areal pertambangan, terbunuh oleh keruntuhan batuan yang diledakkan menggunakan dinamit. Selain berada di bawah teror dan beban fisik dalam kegiatan pertambangan, serdadu Jepang mencegah para petani melakukan kegiatan penanaman. Kerja dialihkan dari lahan pertanian ke pertambangan dan para serdadu memaksa petani-petani menyesuaikan kebiasaan menanam mereka.<sup>88</sup>

Sejak lama, Belanda juga memiliki kepentingan ekonomi berkaitan dengan kelapa. Di awal abad lalu, administrasi kolonial Belanda mengharuskan setiap rumah tangga untuk menanam 50 pohon kelapa di tengah perkembangan kebutuhan pasar global kopra dengan harga yang bagus saat itu. Kebijakan yang mengubah kegiatan produksi ini menyebabkan para petani mengabaikan kegiatan-kegiatan pertanian subsisten mereka.<sup>89</sup> Kelapa kemudian ditanam secara luas di Sulawesi Tengah dan menjadi sumber ekspor kopra dari Sulawesi

---

<sup>84</sup> Albert C. Kruyt, *Kerajaan Mori*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), 4.

<sup>85</sup> Walter Kaudern, *Structure and Settlements in Central Sulawesi*, (Goteborg: Elanders Boktrvckert Aktiebolag, 1925), 31.

<sup>86</sup> Alex L. Ter Braake, *Mining in the Netherlands East Indies* (New York: Bulletins of Netherlands Indies Council of the Institute of Pacific Relations, 1944), 80.

<sup>87</sup> Kaudern, *Structure and Settlements in Central Sulawesi*, 31.

<sup>88</sup> Lorraine V. Aragon, "'Japanese Time' and the Mica Mine: Occupation experiences in the Central Sulawesi Highlands", *Journal of Southeast Asian Studies* 27 No 1 (1996); Lorraine V. Aragon, *Fields of the Lords: Animism, Christian minorities, and state development in Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000), 142-3.

<sup>89</sup> Weber, Kreisel, and Faust, "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by 'Ethical Policy': The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942", 414.

Tengah hingga masa akhir kolonialisme Belanda.<sup>90</sup> Daerah ini memiliki pohon kelapa yang kaya, bahkan beberapa abad sebelum kedatangan pemerintah Belanda. Pada 1657, Navarrete yang mengunjungi Palu, telah menyaksikan keindahan pohon kelapa di lembah itu.<sup>91</sup> François Valentijn, seperti dikutip Acciaioli, yang menulis tentang Lembah Palu pada 1724, menyebut bahwa lembah yang dikelilingi pegunungan yang menjulang tinggi itu, ditumbuhi ribuan pohon kelapa.<sup>92</sup> Tak heran, sejak pertengahan abad 17, minyak kelapa yang digunakan untuk memasak dan penerangan, sudah diekspor dari Lembah Palu, pusat perdagangan saat itu, ke Makasar dan kemudian ke Batavia. Sementara kopra sudah menjadi komoditi ekspor yang utama dari lembah ini pada dekade terakhir abad 19.<sup>93</sup>

Di bidang pertanian, Belanda juga mengembangkan strategi pertanian terutama sawah berbasis teknik irigasi modern. Benar, jauh sebelum kedatangan pemerintah Belanda, pertanian berbasis sawah sudah dikenal lama di Lembah Palu. Menjelang akhir abad 17, Padtbrugge menyatakan bahwa terdapat areal lahan luas nan subur, yang ditanami padi, dengan teknologi pembajakan menggunakan kerbau di Lembah Palu.<sup>94</sup> Kelak, pada tahun-tahun sekitar awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan irigasi dalam skala yang lebih besar untuk areal persawahan yang sudah ada dan dalam rangka perluasan areal persawahan di Palu. Demi peningkatan produksi pertanian, pemerintah Belanda sudah berencana membangun sejumlah proyek irigasi, seperti yang sudah dibangun di sekitar Sungai Gumbasa, Wunu, dan Paneki. Tetapi, karena krisis kapitalisme 1930-an, rencana proyek-proyek tersebut terpaksa batal. Adalah Belanda juga yang memperkenalkan sistem pembajakan sawah secara besar-besaran di daerah ini sejak 1930-an. Belanda juga yang memperkenalkan penanaman jagung sebagai tanaman antara di lahan-lahan sawah yang sudah panen. Administrasi kolonial Belanda juga secara serius memperkenalkan produksi garam di lembah Palu. Usaha-usaha pertanian semacam ini secara perlahan menghancurkan sistem ekonomi subsisten di mana warga semakin bergantung pada produksi pertanian yang relatif modern.<sup>95</sup> Berbeda dengan Lembah Palu, di mana pertanian berbasis sawah sudah dikenal, di Poso, pertanian jenis ini tumbuh lebih lambat. *To Pamona*, misalnya, sejak dekade pertama abad lalu, dikenal masih merupakan peladang berpindah. Pemerintah kolonial Belanda merelokasi para peladang ke tepi Danau Poso dan memperkenalkan pertanian sawah menetap di Tentena pada 1908, di mana setiap rumah tangga diharuskan menanam padi sawah seluas 0,02 hektar. Pertanian sawah di Tentena lantas menjadi contoh bagi desa-desa lain.<sup>96</sup> Belanda juga yang mengirim empat petani ke tempat orang Bali di Parigi, pada

---

<sup>90</sup> Pada 1940, ekspor kopra dari Donggala sebanyak 35.000 ton, Buol Tolitoli 25.000 ton, Poso 37.000 ton, dan Banggai 42.000 ton. Lihat Barbara Sillars Harvey, *Permesta: Pemberontakan setengah hati* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 37. Untuk perbandingan ekspor kopra dari daerah ini pada tahun sebelumnya bisa lihat Henley, *Fertility, Food and Fever*, 548.

<sup>91</sup> Lihat Henley, *Fertility, Food and Fever*, 84.

<sup>92</sup> Lihat Gregory L. Acciaioli, "Searching for Good Fortune: The making of a Bugis shore community at Lake Lindu, Central Sulawesi", (PhD Diss., at Australian National University, 1989), 65.

<sup>93</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 71, 84.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>95</sup> Weber, Kreisel, and Faust, "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by "Ethical Policy": The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942", 412-16.

<sup>96</sup> Schrauwers, *Colonial 'Reformation' in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, 110.

1926, untuk mempelajari teknologi bajak sawah.<sup>97</sup>

Kemudian, komodifikasi hasil hutan sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah masyarakat Sulawesi Tengah. Pemanfaatan damar untuk tujuan ekspor telah berlangsung lama sejak kolonial Belanda, terutama bersumber dari Sulawesi Tengah bagian Timur. Salah satu sumber damar terkaya di Sulawesi adalah Lembah Sungai Sumara, wilayah Kerajaan Mori.<sup>98</sup> Jumlah penduduk yang terlibat dalam pemanfaatan damar juga sangat besar, bahkan meliputi para pengumpul damar musiman dari Lembah Bada, dari pedalaman Poso.<sup>99</sup> Bahkan, *To Wana* juga sudah terkait dengan jaringan perdagangan damar sejak zaman Belanda di area ini.<sup>100</sup> Pada 1900, paling sedikit terdapat 3.500 ton rotan dan 1.500 ton damar diekspor dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah yang berada di bawah kontrol Belanda ini.<sup>101</sup> Selain rotan dan damar, kayu hitam (*Diospyros species*) sudah menjadi komoditi penting di masa itu. Tetapi, di Poso, perdagangan kayu hitam hanya berlangsung di tepi pantai, di luar kediaman orang Poso, dan sama sekali berlangsung di tangan orang-orang asing.<sup>102</sup> Sebagian orang Besoa dan Bada, dari lembah-lembah dataran tinggi di Poso, bersama-sama dengan orang Bugis dan Mandar telah menjadi pedagang kayu hitam – dan juga kayu, rotan, damar, dan kulit buaya – ketika Parigi tumbuh menjadi sentral dari akumulasi dan redistribusi barang di Teluk Tomini, pada dekade 1930-an.<sup>103</sup> Tekanan kolonial yang mendorong para petani memungut hasil hutan untuk diperdagangkan. Penduduk mengumpulkan dan menjual hasil-hasil hutan terutama rotan dan damar untuk membayar pajak kepada Belanda.<sup>104</sup>

Tetapi, Belanda memiliki kebijakan yang ambigu tentang petani yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Di satu pihak, mereka mengontrol para petani untuk mencegah kerusakan hutan. Sebaliknya, mereka juga membolehkan para petani memanfaatkan hasil hutan. Kekhawatiran terhadap deforestasi dan potensi perolehan pajak menjadi penyebab muncul kebijakan-kebijakan yang mendua. Berbagai laporan yang muncul sejak abad 17 telah menggambarkan areal pegunungan di Lembah Palu yang langka dengan pohon dan

---

<sup>97</sup> Schrauwers. 1998. 117. Seperti diketahui, orang Bali pertama kali tiba di Parigi pada 1906 adalah orang-orang buangan politik, karena pemberontakan terhadap kolonialisme Belanda di Bali. Gloria Davis "Parigi: A social history of the Balinese movement to Central Sulawesi, 1907-2974", (PhD., Dissertation at Stanford University, 1976), 107-22.

<sup>98</sup> Albert Schrauwers. 1997. "Houses, Hierarchy, Headhunting and Exchange, Rethinking Political Relations in the Southeast Asian Realm of Luwu." *Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology*, BKI 153-III, p.373. Pada dekade terakhir abad 19, misalnya, elit politik Mori memberlakukan pajak kepada pedagang damar untuk mengontrol ekspor damar di lembah itu. Lihat David Henley, *Jealousy and Justice: the Indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi*, (Amsterdam: VU, Uitgeverij, 2002), 66.

<sup>99</sup> Schrauwers, "Houses, Hierarchy, Headhunting and Exchange, Rethinking Political Relations in the Southeast Asian Realm of Luwu", 373.

<sup>100</sup> Jane M. Atkinson, "Agama dan Suku Wana di Sulawesi Tengah," dalam Michael R Dove, penyunting, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 8.

<sup>101</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 85.

<sup>102</sup> Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, 154.

<sup>103</sup> Davis, "Parigi : A Social History The Balinese Movement To Central Sulawesi", 102, 200.

<sup>104</sup> J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), 153; Cote, "Colonising Central Sulawesi: The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion, 1890-1910", 99.

mengalami deforestasi.<sup>105</sup> Administrasi kolonial Belanda menuding perladangan berpindah sebagai penyebab deforestasi di kawasan pegunungan di wilayah itu. Deforestasi dianggap telah menurunkan ketersediaan air bagi persawahan di sana. Pemerintah Belanda lantas memperkenalkan program reforestasi sejak 1923 dan menetapkan batas hutan lindung sepanjang pegunungan dari Timur ke Barat di Lembah Palu. Kendati muncul juga kritik dari seorang pejabat kolonial yang menganggap program reforestasi dan perlindungan hutan terlalu mengabaikan kebutuhan penduduk lokal. Tetapi, secara resmi, pemerintah memperluas program dan menempuh langkah-langkah lebih keras terhadap petani. Tetapi, kebijakan-kebijakan yang mendua antara reforestasi dan pemanfaatan hasil hutan muncul pada 1926. Saat itu, orang-orang Da'a, dari Pekawa hingga perbatasan dengan *Onderafdeeling* Donggala, dipaksa untuk mengumpulkan rotan, karena mereka masih harus membayar pajak sekitar 100.000 gulden. Dalam waktu yang sama, mereka juga diwajibkan untuk bekerja dalam program reforestasi dua kali dalam setahun.<sup>106</sup>

Satu segi lagi berkaitan dengan intervensi kolonial untuk mengontrol tenaga kerja dan tanah di wilayah ini adalah program relokasi petani peladang dari areal perbukitan. Selain sebagai strategi mencegah deforestasi, maka di bawah 'politik etis', Belanda mengklaim program seperti ini sebagai bagian dari strategi untuk mensejahterakan rakyat.<sup>107</sup> Ini ditunjukkan dengan relokasi para petani peladang, berorientasi "native communalism", dari bukit-bukit ke bibir Danau Poso untuk mempraktikkan pertanian menetap berbasis sawah yang dianggap rasional secara ekonomi.<sup>108</sup> Di Lembah Palu, orang Pekawa dari kawasan pegunungan di pindahkan ke dataran rendah seperti di Sambo dan Bobo, dekat kota Palu. Tetapi, karena kondisi iklim yang berbeda, banyak di antara mereka memilih kembali ke gunung. Tetapi, oleh Belanda, mereka diperbolehkan tinggal di area sebelum hutan lindung. Hanya di desa Bobo, penduduk dari pegunungan tetap tinggal di sana. Hingga 1936, hanya sebagian penduduk dari pegunungan yang tetap bertahan di desa-desa di mana mereka dipindahkan.<sup>109</sup> Tetapi, selama masa pendudukan Jepang, para petani kembali ke gunung. Para penduduk asli kemudian mengambil alih semua lahan pertanian dan pohon-pohon kelapa mereka.<sup>110</sup> Masih di sekitar Palu, Belanda merelokasi orang Rarangganau ke kaki bukit, karena pemerintah melarang kegiatan perladangan di wilayah itu. Ini dilakukan setelah penetapan hutan lindung untuk menjaga suplai air ke sistem irigasi Paneki dan Sungai Wunu. Tetapi, proyek pemukiman kembali ini berjalan tidak sukses. Para petani di sana memilih pergi ke Parigi, setelah mereka dipaksa meninggalkan kampung halamannya.<sup>111</sup> Sementara itu, di Tolitoli, pada 1920, *Controleur* Kortleven menyatakan bahwa ratusan penduduk yang tinggal di pegunungan sudah dipindahkan ke wilayah pesisir. Bahkan, di Buol, lebih seabad sebelumnya, VOC berusaha memindahkan penduduk dari

---

<sup>105</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 282-9.

<sup>106</sup> Weber, Kreisel and Faust, "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by "Ethical Policy": The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942", 416-17.

<sup>107</sup> Li, *The Will to Improve*, 74-6.

<sup>108</sup> Schrauwers, *Colonial 'Reformation' in the Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, 98-100.

<sup>109</sup> Weber, Kreisel and Faust, "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by "Ethical Policy": The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942", 418-19.

<sup>110</sup> Li, *The Will to Improve*, 76.

<sup>111</sup> Weber, Kreisel and Faust, "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by "Ethical Policy": The impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905-1942", 418-19.

wilayah yang terisolasi ini ke Kwandang, dekat Gorontalo. Dengan demikian Belanda dapat mengontrol penduduk di wilayah itu. Kendati usaha relokasi ini gagal.<sup>112</sup>

Mirip dengan program pemukiman kembali penduduk adalah proyek transmigrasi yang sudah diperkenalkan sejak awal abad lalu. Tujuan awal transmigrasi di zaman itu adalah untuk menyediakan cadangan tenaga kerja bagi proyek-proyek perkebunan dan pertambangan di luar Jawa.<sup>113</sup> Di Sulawesi Tengah, pada 1906, sebuah perusahaan swasta, La Wittekruis, memindahkan sekitar 100 keluarga dari Jawa untuk perkebunan kelapa dekat Palu. Proyek ini gagal, karena tanah yang tandus dan banyak penduduk yang meninggal karena malaria.<sup>114</sup> Bala Keselamatan (*Salvation Army*) juga mengklaim telah memindahkan sekitar 300 KK dari daerah sekitar Semarang ke Kalawara untuk pengembangan kebun kelapa sekitar 6.000 pohon, peternakan sapi, babi, dan unggas.<sup>115</sup> Perkebunan ini dirancang untuk membiayai sekolah yang dikembangkan oleh Bala Keselamatan. Tampaknya, Kalawara memiliki prospek yang baik secara komersial. Karena, koloni ini kemudian menjual kopra, kapas, jagung, telur dsb ke kota Palu.<sup>116</sup>

### **Paska 1945**

Kemerdekaan telah mengakhiri karakter eksploitasi berbasis kolonial, tetapi tidak mengakhiri eksploitasi kapitalis. Dengan kata lain, produksi dan reproduksi kapitalis terus berlanjut sesudah kemerdekaan. Kita menyaksikan imperialisme baru hadir tanpa keharusan penguasaan teritorial, seperti di zaman kolonial. Perusahaan-perusahaan transnasional menguasai sektor kapital produktif, kapital dagang, dan kapital uang. Indikasinya, perusahaan-perusahaan Belanda dan perusahaan-perusahaan asal Inggris dan Amerika Serikat menguasai ekonomi modern berskala besar yang menyumbang sekitar 25 persen terhadap total *gross domestic product* (GDP). Pada 1952, delapan perusahaan dagang Belanda menguasai 60 persen impor barang-barang konsumsi dan bank-bank asing mendominasi sepenuhnya perbankan swasta.<sup>117</sup> Situasi ini mendorong kebangkitan kembali nasionalisme ekonomi seperti Kebijakan Benteng dengan tujuan melindungi kepentingan pengusaha pribumi. Puncaknya, terjadi nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dan kemudian Inggris di akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an.<sup>118</sup> Implikasinya,

---

<sup>112</sup> Henley, *Fertility, Food and Fever*, 217.

<sup>113</sup> Jumlah orang yang ditransmigrasikan, terutama ke Sumatera dan kemudian ke Kalimantan dan Sulawesi tidak mencapai setengah juta orang Hans Gooszen, *A Demographic History of the Indonesian Archipelago, 1880-1942*. Leiden: KITLV Press, 1999), 33, 35-6; Lihat juga Murriel Charras, *Dari Hutan Angker hingga Tumbuhan Dewata* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997).

<sup>114</sup> Charras, *Dari Hutan Angker hingga Tumbuhan Dewata Transmigrasi di Indonesia: Orang Bali di Sulawesi*, 53.

<sup>115</sup> Melattie M. Brouwer, *Sejarah Gereja Bala Keselamatan di Indonesia*, (Bandung: Kantor Pusat Teritorial gereja Bala Keselamatan Indonesia, 1994), 172.

<sup>116</sup> Lorraine V. Aragon, *Fields of the Lord: Animism, Christian missionary and state development in Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000), 119-20.

<sup>117</sup> Howard Dick, "Formation of the Nation-State, 1930s - 1966", in Howard Dick et.al., (eds). *The Emergence of a National Economy: An economy history of Indonesia, 1800-2000*, (Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2002), 174.

<sup>118</sup> Tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing lihat William A. Redfern. 2010. "Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s", (PhD. Diss., at University of Michigan, 2010).

produksi dan reproduksi kapital transnasional mengalami gangguan serius. Berhubungan secara tidak terpisah dengan dinamika ekonomi, instabilitas politik menandai proses pembentukan negara paska kemerdekaan. Muncul perang kemerdekaan menghadapi ambisi Belanda untuk kembali menjajah dan atau mengendalikan proses dekolonisasi. Setelah melewati era demokrasi konstitusional selama beberapa tahun, perpolitikan nasional lantas jatuh ke dalam era demokrasi terpimpin.<sup>119</sup> Tetapi, dinamika politik ini hanya bisa dijelaskan secara lebih baik dengan melihat hubungannya dengan geopolitik global di bawah 'Perang Dingin' (Cold War). Ini terutama terjadi setelah pertengahan dekade 1950-an, ditandai pemberontakan-pemberontakan regional seperti PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi yang didukung oleh Amerika Serikat. Ini merupakan kekhawatiran dan tanggapan Barat terhadap perolehan suara signifikan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Pemilu 1955 dan kecenderungan politik Soukarno yang kian ke kiri.<sup>120</sup> Puncak dari efek Perang Dingin adalah peristiwa pembunuhan massal terhadap antara ratusan hingga jutaan anggota dan simpatisan PKI pada 1965 dan tahun-tahun sesudahnya di seluruh kepulauan nusantara.<sup>121</sup> Sangat kuat, bukti-bukti mengenai keterlibatan Barat, khususnya Amerika Serikat, melalui dukungan CIA kepada militer Indonesia dalam peristiwa itu.<sup>122</sup> Dari perspektif perjuangan kelas (*class struggle*), tak salah lagi, peristiwa 1965 merupakan serangan balik fraksi-fraksi kelas kapitalis transnasional agar produksi dan reproduksi kapital transnasional tetap berputar.

Dalam periode ini, Sulawesi Tengah tetap merupakan wilayah pinggiran di kepulauan nusantara, terutama dilihat dari segi kepentingan kapital. Pemberontakan regional seperti Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) dan Permesta berdampak terhadap instabilitas regional di Sulawesi Tengah. Daerah-daerah yang kini menjadi bagian dari kabupaten Poso, Morowali, Donggala, dan Sigi mengalami dampak langsung karena kekerasan-kekerasan bersenjata tersebut.<sup>123</sup> Daerah-daerah yang kaya mineral, khususnya di perbatasan antara provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah menjadi salah satu 'battle ground' antara pasukan DI/TII dengan pasukan TNI. Penduduk di sekitar Danau Matano dan Danau Towuti tersiksa karena pertempuran tersebut.<sup>124</sup> Peristiwa ini menyebabkan pengungsian para petani tradisional dataran tinggi secara besar-besaran

---

<sup>119</sup> Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta, Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007).

<sup>120</sup> Uraian yang lengkap tentang keterlibatan Barat, khususnya Amerika Serikat dalam pemberontakan regional lihat Audrey R. Kahin, George McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingskap keterlibatan CIA di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

<sup>121</sup> Diperkirakan, pembantaian massal 1965 memakan korban antara 150.000 hingga 2.000.000 orang. Perkiraan jumlah orang yang dibantai pada peristiwa itu lihat Robert Cribb, "Pendahuluan: Masalah-masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia", dalam Robert Cribb (Editor), *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), 23.

<sup>122</sup> Mengenai hubungan CIA dengan kudeta militer 1965 lihat B.R. Simpson, *Economist with guns: Authoritarian development and U.S.-Indonesian Relation, 1960-1968*, (Stanford: Stanford University Press, 2008).

<sup>123</sup> Lihat Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989); Harvey, *Permesta: Pemberontakan setengah hati*.

<sup>124</sup> Lihat Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari tradisi ke DI/TII*; Robinson, *Stepchildren of Progress*, 84-93; Hendro Subroto, *Sintong Panjaitan: Perjalanan seorang prajurit para komando*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 63-100.

khususnya dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah.<sup>125</sup> Dalam situasi seperti itu, boleh dibilang, usaha ekonomi produktif modern tidak berkembang.

Juga, di Sulawesi Tengah, secara historis, PKI bukan partai yang menonjol, sehingga daya rusak peristiwa 1965 tidak sedalam dibanding di Jawa dan Bali. Dalam Pemilu Parlemen 1955, partai ini hanya meraup 0,93 persen suara di Poso dan 0,25 persen di Donggala.<sup>126</sup> Angka yang rendah dibanding perolehan suara partai ini di tingkat provinsi (Sulawesi Utara-Tengah), yakni 4,39 persen dan nasional 16,4 persen.<sup>127</sup> Tetapi, peristiwa 1965 meninggalkan pengalaman traumatis bagi kader dan simpatisan partai tersebut. Beberapa pimpinan PKI dibunuh, tanpa kuburan jelas. Ratusan atau mungkin ribuan orang dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan. Ketika melakukan interogasi, aparat keamanan menyiksa mereka secara fisik dengan memukul dan menyetrom dengan aliran listrik. Pimpinan PKI ditahan di penjara Maesa, Palu, dan bersama-sama dengan tahanan PKI lainnya dipekerjakan secara paksa untuk pembangunan jalan raya, tanggul Sungai Palu, dan gedung pemerintahan di Palu. Menurut bekas pimpinan Barisan Tani Indonesia (BTI) Sulawesi Tengah, mereka menjadi buruh tanpa upah dari proyek-proyek konstruksi dengan kontraktor tentara. Tenaga kerja mereka sering “dibon” untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik di kediaman pimpinan tentara dan pejabat-pejabat sipil di Palu. Mereka juga kehilangan hak-hak politik. Menghadapi Pemilu 1971, ribuan orang tidak boleh ikut memberikan suaranya dalam Pemilu, karena keterkaitan mereka dengan PKI.<sup>128</sup>

Peristiwa 1965 merupakan momen paling bersejarah yang memberi 'karpas merah' untuk era imperialisme di Indonesia. Bersandar kepada perlindungan regim politik otoriter Suharto yang didukung Barat, transnasional kapital kembali melakukan reinvestasi untuk mengeruk super profit, berkat eksploitasi buruh murah dan kemudahan akses atas tanah dan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan (re)liberalisasi ekonomi di bawah supervisi Barat sesaat sesudah pembentukan Orde Baru menunjang proses transnasionalisasi kapital tersebut. Peluncuran undang-undang tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan undang-undang sektoral terutama pertambangan baru di akhir dekade 1960-an memberikan akses ke transnasional kapital untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah non-kapitalis di mana kekayaan sumber daya alam melimpah ruah. Setelah era *oil boom*, 1974-1981, yang menggelembungkan penerimaan pemerintah, kejatuhan harga minyak memaksa pemerintah, sejak awal dekade 1980-an, melakukan berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi di sektor perdagangan, investasi, dan keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan syarat bagi pertumbuhan industri berorientasi ekspor. Hasilnya, ekonomi Indonesia kian terintegrasi ke dalam kapitalisme global. Indikasinya, perdagangan dan investasi asing melonjak sebelum dihantam krisis kapitalisme Asia Timur akhir dekade 1990-an.<sup>129</sup> Tetapi harga yang harus dibayar adalah penghancuran masyarakat

---

<sup>125</sup> Schrauwers, *Colonial 'Reformation' in the Highlands of Central Sulawesi Indonesia, 1892-1995*, 82.

<sup>126</sup> Harvey, *Permesta: Pemberontakan setengah hati*, 41.

<sup>127</sup> Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 84, 115.

<sup>128</sup> Arianto Sangaji. Poso. Tentang penggunaan tenaga kerja paksa lihat juga Razif, “Romusha dan Pembangunan: Sumbangan tahanan politik untuk rezim Soeharto”, dalam John Rosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid (editor). *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami pengalaman korban 1965*. Jakarta: ELSAM & Institute Sejarah Sosial Indonesia, 2004), 152-61.

<sup>129</sup> Salah satu indikator kemajuan perdagangan adalah nilai ekspor komoditas hasil industri meningkat dari

pertanian non-kapitalis dan pengrusakan ekosistem lokal melalui perampasan tanah atas nama industri keruk sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dll, terutama di luar Jawa.<sup>130</sup> Praktik-praktik perampasan tanah milik petani-petani kecil pada era ini juga berkaitan dengan beragam sektor, dari pembangunan bendungan, lapangan golf, lokasi pabrik, mall, hotel, hingga tempat latihan militer.<sup>131</sup> Tentu saja, ongkos yang lain adalah eksploitasi buruh murah yang telah memicu perlawanan buruh yang luas.<sup>132</sup> Sesudah krisis kapitalisme di akhir dekade 1990-an dan kejatuhan Soeharto, regim politik reformasi melakukan liberalisasi ekonomi lebih dalam. Hasilnya, perdagangan internasional mengalami pertumbuhan signifikan seperti peningkatan nilai ekspor, terutama nilai ekspor komoditas berbasis sumber daya alam.<sup>133</sup> Sekali lagi, ongkos di balik kemajuan itu adalah perluasan cakupan geografi proses-proses perampasan tanah para petani kecil dengan kekerasan berdarah di kepulauan nusantara sebagai syarat bagi operasi industri-industri keruk penghasil bahan baku untuk tujuan ekspor.<sup>134</sup>

---

USD 2,4 milyar pada 1982 menjadi USD 34,9 milyar pada 1997. Kontribusi nilai ekspor hasil industri terhadap total nilai ekspor meningkat dari 11,04 persen (1982) menjadi 65,35 persen (1997). Lihat Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi Mei 1989*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1989), 92 dan; Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi 1999*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1999), 93.

<sup>130</sup> Lokasi-lokasi penambangan Freeport di Grassberg dan Ertsberg, serta pabrik dan kota Tembagapura adalah wilayah-wilayah yang secara tradisional dikuasai oleh suku Amungme. Sementara, areal pembuangan *tailing*, kota Timika dan kota pertambangan Kuala Kencana adalah areal yang secara tradisional dikuasai oleh suku Komoro. Tak heran, kehadiran Freeport telah menghancurkan kegiatan pertanian tradisional dan perburuan kedua suku itu. Lihat Denise Leith, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii'i Press, 2002), 85-7; Carolyn Marr, *Digging Deep: the hidden costs of mining in Indonesia*, (London: Down to Earth and Minewatch, 1993), 81-6.

<sup>131</sup> Lihat misalnya Anton Lucas, "Land Disputes in Indonesia: Some current perspectives", *Indonesia*, 53 (1992), 81.

<sup>132</sup> Tentang eksploitasi dan perlawanan buruh lihat misalnya Douglas Anton Kammen, "A Time to Strike: Industrial strikes and changing class relations in New Order Indonesia", (PhD Diss., Cornell University, 1997); Christ Manning, "Structural Change and Industrial Relations During the Soeharto Period: An approaching crisis?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29 No 2 (1993); lihat juga Danu Rudiono, "Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak", *Prisma*, 1 (1992).

<sup>133</sup> Salah satu indikator, total nilai ekspor melonjak dari USD 53,4 miliar pada 1997 ke USD 85,6 milyar pada 2005, dan menjadi USD 190 milyar pada 2012. Sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam menyumbang signifikan terhadap perkembangan nilai ekspor nasional. Sebagai ilustrasi, nilai ekspor beberapa komoditas utama bersumber industri berbasis sumber daya alam meningkat tajam dari masa sebelum krisis. Jika, pada 1997, nilai ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*) adalah USD 1,4 milyar, maka pada 2005 meningkat menjadi USD 3,7 milyar, dan pada 2012 meroket menjadi USD 17,6 milyar. Pada masa yang sama nilai ekspor komoditas-komoditas hasil-hasil tambang meningkat dari USD 3,1 milyar (1997) menjadi USD 7,9 milyar (2005), dan melonjak tajam USD 31,3 milyar (2012). Sementara itu, nilai ekspor minyak dan gas (migas) dari USD 11,6 milyar (1997), menjadi USD 19,2 milyar (2005), dan USD 36,9 milyar (2012). Lihat Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi 1999*; Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi Agustus 2013*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013).

<sup>134</sup> Konsekwensinya, sebagai ongkos yang harus dibayar, hanya pada 2013, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 369 konflik agraria di seluruh Indonesia yang melibatkan 139.874 kepala keluarga. Konflik itu berkaitan dengan kawasan hutan seluas 527.939 hektar, perkebunan 527.939,27 hektar, pertambangan 197.365,90 hektar. Dari konflik-konflik itu, 21 orang meninggal, 30 orang tertembak, 130 mengalami penganiayaan, dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan. Konsorsium Pembaruan Agraria, "Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY", *Laporan Akhir Tahun*, (Jakarta, 19 Desember, 2013)



Di Sulawesi Tengah, sejak Orde Baru, proses-proses akumulasi primitif berlangsung marak dengan skala yang luas. Antropolog Tania Murray Li yang pertama berusaha menggunakan konsep akumulasi primitif untuk menyoroiti pengalaman empirik Sulawesi Tengah. Kendati tidak dielaborasi dengan dalam, tetapi dalam *The Will to Improve*, dia tampak mencoba mengerti salah satu aspek dari "enclosure" yakni usaha para petani melalui mekanisme "improvement".<sup>135</sup> Berbeda dengan Li, saya lebih melihat aspek akumulasi primitif dalam pengalaman perampasan tanah milik petani-petani kecil sebagai syarat bagi akumulasi kapital terutama dalam industri skala besar berbasis sumber daya alam. Praktik akumulasi primitif melalui mekanisme "enclosure" dalam bentuk baru juga terjadi seperti penetapan kawasan-kawasan konservasi dan penetapan batas-batas hutan dan tata ruang. Program transmigrasi juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari akumulasi primitif sejak implikasinya yang kompleks terhadap proses perampasan tanah dan penciptaan kelas pekerja. Seperti sudah terjadi, proses-proses perampasan tanah berlangsung melalui mekanisme-mekanisme kekerasan, teror, dan kriminalisasi terhadap petani, di samping penghancuran terhadap kebun, ladang, sawah dan sumber-sumber penghidupan mereka. Negara memainkan peran sentral dalam perampasan dengan membuat regulasi di berbagai tingkatan yang menyingkirkan para petani dari tanah-tanahnya. Negara juga hadir, dengan mengirim aparat bersenjata untuk menembak dan memenjarakan para petani. Proses-proses ini berlangsung di sektor-sektor modern kehutanan, pertambangan termasuk minyak dan gas, perkebunan, dll. Implikasi dari proses ini adalah terjadi penguasaan tanah yang luas oleh segelintir kelas kapitalis. Sebagai ilustrasi, dalam konteks Sulawesi Tengah, hingga pertengahan dekade pertama abad 21, pemerintah sudah menerbitkan perizinan untuk bisnis modern berskala besar meliputi perkebunan, perusahaan hutan, dan pertambangan untuk areal seluas empat setengah juta hektar.<sup>136</sup> Kendati sebagian di antara areal perizinan seluas itu tumpang tindih satu dengan yang lain, tetapi jelas menunjukkan peranan sentral negara dalam proses redistribusi tanah dengan memfasilitasi proses konsentrasi penguasaan tanah di tangan segelintir kelas kapitalis.

Berhubungan dengan aspek kedua dari akumulasi primitif, yakni, penciptaan tenaga kerja bebas, ternyata yang terjadi di daerah ini adalah proses proletarianisasi yang lamban. Para petani yang kehilangan tanah atau tanah-tanah pertanian mereka terganggu oleh kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam berskala besar tidak serta-merta menjadi kelas pekerja. Tendensi kapitalisme modern yang hemat tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja menjadi batu sandungan yang menghambat terbentuk kelas pekerja dalam jumlah signifikan. Kita melihat dalam pengalaman Sulawesi Tengah, sektor-sektor modern perkebunan dan pertambangan tumbuh menjadi 'enklaf', dikelilingi limpahan tenaga kerja cadangan di sektor pertanian yang sudah mengalami transformasi sedemikian rupa. Tenaga kerja cadangan ini meliputi mereka yang tergolong sebagai semi-proletar, yakni yang menjual tenaga kerja secara temporal untuk memperoleh uang tunai di sela-sela kegiatan pengolahan lahan-lahan pertanian subsistensi mereka sendiri. Tenaga kerja cadangan di sektor pertanian juga meliputi petani-petani kecil subsisten yang menanam tanaman pangan

---

<sup>135</sup> Li, *The Will to Improve*, 18-9.

<sup>136</sup> Arianto Sangaji, "The Masyarakat Adat Movement in Indonesia: A critical insider's view", in Jamie S. Davidson and David Henley (eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*, 326.

untuk kebutuhan konsumsi langsung, petani-petani kecil yang menanam tanaman-tanaman perkebunan berskala kecil (kopi, kakao, cengkih, dll) untuk memperoleh uang tunai, dan kombinasi antara kedua tipe petani ini. Para petani kecil ini lebih mengandalkan suplai tenaga kerja dari dalam rumah tangga sendiri.

a) Momen-momen perampasan tanah

*Transmigrasi.* Seperti juga di zaman kolonial, program transmigrasi tidak boleh secara sederhana dipersepsikan sebagai pemindahan penduduk, khususnya petani-petani miskin tak bertanah, dari daerah-daerah padat penduduk terutama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ke daerah-daerah yang relatif langka penduduk. Program ini menjadi contoh bagaimana pemerintah menangani soal ketidak-merataan distribusi lahan dan tenaga kerja. Petani-petani tak bertanah atau buruh tani dan petani-petani dengan luas lahan pertanian yang sangat kecil dari daerah-daerah itu dipersiapkan menjadi petani kecil dengan penguasaan lahan hingga dua hektar. Tetapi, proyek ini seperti yang kita lihat juga merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menyiapkan buruh murah di sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit melalui skema perkebunan inti rakyat. Oleh karena itu, program transmigrasi lebih baik dilihat sebagai usaha redistribusi tenaga kerja cadangan secara spasial, di mana Sulawesi Tengah merupakan daerah sasaran yang penting. Sejak Pra Pembangunan lima Tahun (Pelita) hingga Pelita VI, melalui program transmigrasi, pemerintah telah memindahkan ratusan ribu jiwa penduduk ke provinsi ini (lihat **Tabel 1**). Setidaknya, di atas kertas, pemerintah sudah melakukan redistribusi lahan pertanian hampir seratus tujuh puluh ribu hektar kepada hampir delapan puluh lima ribu kepala keluarga transmigran di Sulawesi Tengah selama periode tersebut. Kendati banyak kisah mengenai kegagalan program ini di mana sebagian transmigran pergi meninggalkan lokasi-lokasi transmigran, tetapi Tolai di Parigi Moutong adalah salah satu contoh sukses program transmigrasi berbasis pertanian tanaman pangan di daerah ini.

**Tabel 1.** Penempatan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jiwa Transmigran sejak pra-Pelita hingga Pelita VI Berdasarkan Kabupaten di Sulawesi Tengah

Kabupaten	Jumlah KK	Jumlah jiwa
Donggala	26182	109281
Banggai	23423	95072
Poso	23489	93961
Buol Toli-toli	11810	43821
Jumlah	84904	342135

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Tengah (1998, 88).

Selain program transmigrasi berbasis pertanian tanaman pangan, program ini secara langsung dan tidak langsung telah terintegrasi sedemikian rupa dengan industri perkebunan besar, terutama sebagai sumber pasokan tenaga kerja murah. Paling utama adalah program transmigrasi dengan skema perkebunan inti rakyat (PIR) yang diperkenalkan oleh

pemerintah Indonesia dengan menyertakan sektor swasta.<sup>137</sup> Dari sudut kepentingan swasta, program ini memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh suplai tenaga kerja murah. Sementara dari segi kepentingan para petani, program ini memberikan akses penguasaan mereka secara nominal terhadap lahan-lahan perkebunan. Contoh salah satu proyek PIR paling awal di Sulawesi Tengah terdapat di Kecamatan Lembo, Kabupaten Poso (kini kabupaten Morowali Utara) dalam usaha perkebunan karet, ketika pemerintah menempatkan lebih dari 2.000 kepala keluarga sejak pertengahan dekade 1980-an.<sup>138</sup>

Di daerah-daerah tujuan, program transmigrasi kerap berhubungan dengan perampasan tanah milik petani-petani kecil. Umum terjadi, program ini dilaksanakan di atas lahan-lahan yang dianggap tak bertuan. Di Sulawesi Tengah, salah satu contoh bagaimana proyek transmigrasi menjadi instrumen perampasan tanah melalui pengingkaran hak petani atas tanah terjadi di Desa Bahumotefe, Kecamatan Bungku Tengah (kini Kecamatan Bungku Timur) pada dekade 1980-an. Kendati mengakui hak adat atas tanah, tetapi pemerintah mengklaim sejumlah tanah adalah milik negara.<sup>139</sup> Sebaliknya, sejumlah petani mengakui bahwa sebagian di antara tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara adalah tanah milik petani dengan tanaman perkebunan dan lahan yang diistirahatkan. Tidak semua petani menyetujui proyek penempatan transmigrasi, tetapi tidak berdaya menghadapi rayuan dan tekanan pemerintah. Akhirnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mulai menempatkan sekitar 700 kepala keluarga transmigran asal Jawa, Bali, dan Lombok di wilayah itu pada tahun anggaran 1991/92.<sup>140</sup> Para transmigran sebanyak itu disebarkan ke dua lokasi, yakni Bahudopi dan Bahumotefe. Pemerintah memasukkan sebagian penduduk setempat juga

---

<sup>137</sup> Lihat Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Seberang: Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2003), 229-233.

<sup>138</sup> Pemerintah menempatkan ribuan transmigran perkebunan inti rakyat khusus (Pirsus) sejak Pelita IV (1984/1985-1988/89) di UPT Pirsus Lembo I, Pirsus Lembo II, Pirsus Lembo III, Pirsus Lembo IV, Pirsus Lembo V, dan Pirsus Lembo VI sebanyak 2.290 keluarga atau 8.881 jiwa. Kantor Statistik Kabupaten Poso, *Kabupaten Poso dalam Angka 1991*, (Poso: Kantor Statistik Kabupaten Poso, 1991), 66. Program yang mengintegrasikan antara proyek transmigrasi dengan usaha berskala besar berbasis sumber daya alam ini juga berlangsung di daerah lain seperti proyek transmigrasi swadaya mandiri (TSM) dengan pola agro-estate yang dilakukan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Toili, Banggai. Lihat Mohammad Syaifei T. Tama, "Perluasan Sawit Berbuah Petaka", *Kertas Posisi* No 09, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2010).

<sup>139</sup> Saat itu, Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tengah menyiapkan areal di sekitar desa itu sebagai bagian dari rencana penempatan transmigrasi. Sebuah tim kerja pemerintah yang melakukan inventarisasi lahan di Bahumotefe dan desa-desa sekitarnya menyimpulkan bahwa para petani di sana adalah peladang berpindah dengan klaim hak-hak adat atas tanah. Jumlah penduduk di desa-desa itu sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah. Tim menyebut tersedia lahan sekitar 2.000 hektar di desa Bahumotefe dan desa Bahomoahi yang bisa diperuntukkan bagi 500 KK transmigran. Dari lahan seluas itu, 1.000 hektar merupakan areal hak pengusahaan hutan (HPH) PT. Tri Aman Abadi dan PT. Handy Cahaya Timber. Kedua perusahaan dilaporkan sudah bersedia melepaskan lahan seluas itu untuk keperluan proyek transmigrasi. Sisanya merupakan lahan pertanian ratusan petani setempat yang ditanami berbagai jenis tanaman seperti kelapa, sagu, jambu mente, pisang, kapuk, sawah, cengkeh, nangka, langsung, dll. Tim mengklaim bahwa status lahan-lahan tersebut adalah tanah adat dan tanah negara. Laporan itu juga mengklaim bahwa para petani menyetujui penempatan transmigrasi agar daerah itu cepat berkembang dan tidak terisolasi. Saat itu, di Desa Bahumotefe terdapat 150 kepala keluarga dengan 387 jiwa dan Desa Bahomoahi 65 kepala keluarga dengan 394 jiwa. Proyek Penyelesaian Hak Atas Tanah Daerah Transmigrasi Daerah (PHDT) Direktorat Agrarian Propinsi Sulawesi Tengah, *Laporan Hasil Investarisasi Lokasi Transmigrasi Tahun 1984/1985*, (Palu, 1984).

<sup>140</sup> Lihat Arief Patanga, *Memori Pelaksanaan Tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso Masa Bakti 1989-1994*, (Poso: Pemda Kabupaten Poso, 1994), 154-6.

sebagai transmigran sisipan. Belakangan, beberapa tokoh masyarakat di Bahumotefe menyatakan bahwa dengan memasukkan warga setempat sebagai transmigran sisipan diharapkan dapat mencegah konflik karena konversi tanah-tanah mereka ke dalam proyek transmigrasi ini. Berbeda dengan pengalaman di Bahumotefe, proses perampasan tanah di tempat lain berlangsung lebih kasar dan brutal. Tanpa pemberitahuan sama sekali kepada para petani, tiba-tiba lahan-lahan pertanian mereka dihancurkan begitu saja. Salah satu praktik perampasan tanah seperti ini terjadi, misalnya, pada pertengahan dekade 1990-an, ketika pemerintah menempatkan transmigran dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di atas tanah-tanah Tau Taa Wana Bulang. Seperti ditulis oleh seorang aktivis terkemuka lembaga swadaya masyarakat (LSM), Nasution Camang, PT Ariscon, perusahaan kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut, menggusur lahan-lahan pertanian milik tidak kurang dari 24 petani.<sup>141</sup>

*Hak Pengusahaan Hutan (HPH)*. Salah satu kegiatan ekstraksi sumber daya alam paling awal berlangsung terutama setelah Orde Baru di Sulawesi Tengah adalah kegiatan pengusahaan kayu gelondongan melalui konsesi HPH. Hanya dari tahun 1970 dan 1971, pemerintah sudah menerbitkan izin penebangan kayu (kayu lunak dan kayu hitam) dengan luas areal sekitar 37.600 hektar hutan. Hutan seluas itu diberikan kepada 18 perusahaan dan individu dengan setiap areal perizinan sekitar 2.000 hektar. Tampaknya, pemerintah menerbitkan perizinan itu bagi usaha-usaha berskala kecil dan menengah. Dan dalam periode sama, pemerintah sudah merekomendasikan persetujuan bagi pemegang izin konsesi hutan berskala besar kepada 17 perusahaan swasta dengan areal hutan seluas 1,7 hektar yang menyebar di kabupaten-kabupaten Luwuk Banggai, Poso, Buol Tolitoli, dan Donggala.<sup>142</sup> Perizinan berskala besar ini kelak lazim dikenal sebagai HPH.

Tidak heran, HPH menjadi momen perampasan tanah paling awal setelah kemerdekaan di wilayah ini. Seperti kita lihat, banyak konflik terjadi antara perusahaan-perusahaan pemegang HPH dengan petani-petani tradisional di sekitar hutan. Penyebabnya macam-macam, tetapi paling utama adalah perusahaan menghilangkan akses para petani kecil ke hasil-hasil hutan (kayu dan bukan kayu) dan penggusuran kebun-kebun mereka. Dari sekian banyak kasus yang terjadi sejak operasi HPH di Sulawesi Tengah, salah satu pengalaman paling buruk menimpa Tau Taa Wana Bulang di Kabupaten Banggai. Salah satu pemegang HPH, PT Bina Balantak Raya (BBR) telah membabat areal hutan yang kaya dengan damar milik mereka. Perusahaan juga membabat kebun kopi dan kemiri milik suku pribumi tersebut.<sup>143</sup> Selain itu, pengrusakan ekosistem lokal oleh pemegang konsesi HPH juga merupakan praktik penghancuran terhadap usaha pertanian petani-petani kecil. Pada 1999, di Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, kegiatan pengolahan hutan di areal konsesi seluas 48.000 hektar yang dilakukan atas kerjasama PT. Gandus dengan PT. Inhutani I telah menimbulkan banjir bandang. Sebuah investigasi bersama yang

---

<sup>141</sup> Padahal di atas lahan-lahan itu, para petani menanam 16.900 pohon kopi, 582 pohon kelapa, 23.350 kemiri, 2.360 kakao, dan berbagai tanaman lain seperti jambu mente, langsung, durian, mangga, dsb. Lihat Nasution Camang, *Tau Taa Wana Bulang Bergerak untuk Berdaya*, (Palu: Yayasan Merah Putih, 2003), 67-8.

<sup>142</sup> Lihat Kantor Sensus dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, *Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 1971*, (Palu: Kantor Statistik Sulawesi Tengah, 1971), 144-7.

<sup>143</sup> Camang, *Tau Taa Wana Bulang: Bergerak untuk berdaya*, 68-70.

dilakukan WALHI Sulawesi Tengah dan Evergreen Indonesia di akhir 2001 menyebut peristiwa banjir itu telah merusak puluhan hektar sawah dan 5.000 hektar kebun para petani, serta merusak jalan yang menghubungkan poros Palu-Tolitoli. Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa seluruh desa di areal penebangan hutan PT. Gandus mengalami banjir lumpur. Akibatnya, areal persawahan seluas 30 hektar di desa Ponggerang, 60 hektar di Malonas, dan 30 hektar di Panili mengalami kerusakan. Para petani di desa-desa itu mengklaim bahwa sejak perusahaan beroperasi, hanya sekitar 50 persen areal persawahan mereka dapat dialiri air. Soalnya, saluran irigasi sepanjang 3 kilometer di sana tertimbun oleh lumpur. Seperti diketahui, sebelum kedua perusahaan itu beroperasi, PT. Sinar Kaili beroperasi di areal HPH itu dalam periode 1974-1995.<sup>144</sup>

*Perkebunan sawit.* Momen-momen perampasan tanah di Sulawesi Tengah menonjol terjadi pada akhir dekade 1980-an, setelah ekspansi perkebunan sawit berskala besar yang rakus tanah ke daerah ini. Praktik-praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh konglomerasi-konglomerasi raksasa di sektor ini di Sulawesi Tengah sudah diketahui luas.<sup>145</sup> Praktik perampasan berlangsung menggunakan beberapa mekanisme seperti perizinan pemerintah, teror, intimidasi, kekerasan, dan stigmatisasi. Di Morowali, momen-momen tersebut terjadi sejak akhir 1980-an, yang saat itu masih merupakan bagian dari Kabupaten Poso, ditandai dengan kehadiran PT. Tamaco Graha Krida (TGK).<sup>146</sup> Pada 1988, perusahaan melakukan pembukaan lahan untuk pembibitan kelapa sawit seluas 30 hektar di areal perkebunan milik warga di dekat Sungai Lantolimbu Desa Emea. Warga yang mempertahankan lahan itu dengan memasang kawat duri tidak dapat berbuat apa-apa ketika polisi dan tentara bersenjata menghancurkan pagar-pegar itu. Proses pembukaan lahan ini diresmikan oleh Bupati Poso Letnan Kolonel Sugiono anggota dan dihadiri oleh Muspida Kabupaten Poso. Setelah itu terjadi penyerahan lahan-lahan pertanian (padi ladang, sawah dan aneka tanaman

---

<sup>144</sup> Anonymous, "Babat Hutan, Banjir Lumpurpun Datang", *Bergerak* Edisi 08 Tahun II (2002), 9.

<sup>145</sup> Lihat Arianto Sangaji, "Transisi Kapital di Sulawesi Tengah: Pengalaman industri perkebunan kelapa sawit", *Kertas Posisi* No 8, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2009).

<sup>146</sup> Di masa Orde Baru, menjelang krisis kapitalisme 1997/98, Grup Salim, misalnya, melalui Salim Palm Plantation menjadi salah satu pemain utama dalam perkebunan kelapa sawit. Grup ini menguasai 24 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyebar di beberapa pulau besar di Indonesia dengan kepemilikan yang bervariasi antara 20% hingga 100%. Setelah krisis kapitalisme melanda Asia Timur dan Asia Tenggara di akhir 1990an, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Gumpulan Guthrie Berhad (Malaysia) mengakuisisi perkebunan-perkebunan kelapa sawit Grup Salim. Nilai akuisisi adalah sekitar USD 375 juta. Luas areal perkebunan sawit yang diakuisisi itu ditaksir sekitar 250.000 hektar, menyebar dari Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Penjualan kepada Guthrie ini mengundang protes dari anggota DPR RI, karena melanggar kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk membahas kembali penjualan itu. BPPN yang saat itu harus mencari IDR 27 triliun untuk menambal APBN 2001 buru-buru menjual salah satu aset terbaik milik Grup Salim ini, tanpa sepengetahuan DPR. Pada 2006, Guthrie melakukan merger dengan Sime Darby, salah satu perusahaan produsen minyak sawit dunia asal Malaysia. Saat ini grup Sime Darby menguasai 204.504 hektar areal perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami di Indonesia atau 38,35% dari total kelapa sawit milik Sime yang sudah di tanami di mana-mana di luar Indonesia. Penguasaan areal seluas itu dilakukan melalui anak usahanya, PT Minamas Plantation yang beroperasi di 71 lokasi perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, termasuk PT TGK di Morowali. Lihat Arianto Sangaji, "Kapitalisme dan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Konsentrasi dan sentralisasi kapital dan eksploitasi tenaga kerja", *paper* disampaikan dalam *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Sawit Watch di Bogor, 17 Januari, 2014.

palawija) atau cadangan lahan pertanian, dan tempat penggembalaan ternak kepada perusahaan. Penyerahan dilakukan oleh belasan kepala desa yang mewakili para petani. Perusahaan akan membuka lahan-lahan itu sebagai kebun plasma. Para petani setempat diprioritaskan akan menjadi petani plasma. Dalam catatan perusahaan luas lahan yang diserahkan oleh 15 desa mencapai hampir tiga ribu hektar, tetapi sebaliknya sebuah klaim dari para petani setempat menyatakan bahwa luas lahan milik 5.000 kepala keluarga yang diserahkan mencapai 7.000 hektar, di mana hutan sagu, bekas-bekas kebun yang sudah ditumbuhi hutan, dan tempat-tempat penggembalaan ternak juga dihitung sebagai bagian dari hak milik itu. Sebelumnya sebagian petani tidak mau menyerahkan lahan pertanian mereka tetapi kemudian diintimidasi, dituduh anti pembangunan dan dicap sebagai anggota PKI oleh aparat keamanan.<sup>147</sup> Di luar itu, mekanisme perampasan tanah juga berbasis pada klaim tanah negara, sebuah klaim yang berakar jauh di zaman kolonial,<sup>148</sup> dan terus digunakan setelah kemerdekaan. Salah satu contoh, PT. Perkebunan Negara XIV yang membuka areal perkebunan kelapa sawit sekitar 6.000 hektar di sekitar Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso (kini Kabupaten Morowali Utara) sejak dekade 1990-an. Seperti biasa, kehadiran perusahaan juga memicu sengketa pertanahan dengan penduduk setempat. Pada 1998, sempat terjadi modus perampasan tanah oleh perusahaan dengan pembakaran kebun-kebun penduduk. Terhadap warga yang kebun-kebunnya terbakar, perusahaan mendekati mereka dengan iming-iming ganti rugi. Tetapi, jika warga menolaknya, maka perusahaan mengklaimnya sebagai tanah negara.<sup>149</sup> Begitu mudah, klaim *tanah negara* digunakan untuk menyingkirkan hak-hak petani atas tanah. Mekanisme lain adalah *kriminalisasi* terhadap petani untuk memperlicin proses perampasan tanah. Di Banggai, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) melakukan perampasan tanah yang berlangsung dengan brutal di beberapa desa. Setelah muncul perlawanan, kasus KLS ini berbuntut dengan kriminalisasi terhadap para petani dan aktivis pendamping mereka. Pemerintah memenjarakan 23 petani dan seorang aktivis politik agraria terkemuka Eva Bande dengan tuduhan melakukan tindakan pengrusakan.<sup>150</sup> Kriminalisasi serupa juga terjadi di Donggala. Pada 2004, di Rio Pekava,

---

<sup>147</sup> Proses perampasan dimulai setelah perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di atas areal 15.000 hektar. PT. TGK menerapkan pola perkebunan inti rakyat (PIR), dengan luas kebun plasma 5.423 hektar, dimiliki oleh 4.556 kepala keluarga. Lihat Sangaji, "Transisi Kapital di Sulawesi Tengah: Pengalaman industri perkebunan kelapa sawit", 12.

<sup>148</sup> UU Agraria 1870 merupakan contoh bagaimana melalui regulasi, pemerintah menghancurkan sistem kepemilikan atau penguasaan atas tanah berdasarkan hukum adat dan merampas tanah-tanah itu. Mekanisme ini digambarkan melalui apa yang disebut dengan "domain-declaration" (*domeinverklaring*). Pasal 1 "*Agrarisch Besluit*" menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai hak milik (*eigendom*) akan dikuasai oleh negara. Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), 221.

<sup>149</sup> Berbeda dengan PT. TGK, yang memiliki pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) di Desa Ungkaya, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, perusahaan ini mengangkut produksi sawit ke pabrik CPO miliknya di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan. Arianto Sangaji. Poso

<sup>150</sup> September 2008, perusahaan ini menggusur lahan-lahan perkebunan - kakao, pisang, durian, rambutan, kelapa, dll -- milik para petani dalam program transmigrasi pola agroestate di Desa Singkoyo. Program transmigrasi ini dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. KLS berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Perusahaan dengan sukarela melepaskan arealnya seluas 275 hektar dan sebagai kompensasinya memperoleh dana sebanyak 800 juta dari pemerintah melalui APBN. Bukan hanya peserta transmigran agroestate, petani penduduk asli setempat dari Desa Singkoyo juga menjadi korban KLS. Sekitar 1.519 hektar tanah desa Sangkoyo milik penduduk asli setempat sudah lebih dahulu dirampas untuk dijadikan areal perkebunan inti perusahaan itu. Lihat Tama, "Perluasan Sawit Berbuah Petaka"; Anonymous, "Seluk

Donggala, pemerintah menjebloskan tiga petani selama 4 bulan penjara, karena mereka merampas senjata api milik Brimob. Padahal, mereka merampasnya, karena sudah tidak tahan dengan teror terus-menerus oleh petugas Brimob yang menjaga perkebunan sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (LTT), anak usaha PT. Astra Agro Lestari Tbk. Duduk masalahnya, perusahaan itu merampas tanah-tanah petani dengan menghancurkan kebun-kebun, terutama kakao milik mereka.<sup>151</sup>

*Pertambangan.* Di sektor pertambangan, praktik perampasan tanah menjadi keharusan sejak deposit mineral terletak di bawah di areal lahan yang luas. Di Sulawesi Tengah, sejak Orde Baru, pemerintah sudah menerbitkan kontrak karya (KK) seluas ratusan ribu hektar. Kendati hingga saat ini belum ada kegiatan eksploitasi, tetapi KK itu sudah memicu konflik luas.<sup>152</sup> Praktik perampasan tanah paling utama bermula sejak 1968, PT. Inco memperoleh kontrak karya (KK) di atas lahan lebih dari 200.000 hektar di tiga wilayah provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Khusus di Sulawesi Tengah, areal KK tidak kurang dari 30.000 hektar terletak di wilayah Kabupaten Morowali. Di Sorowako, Sulawesi Selatan, kehadiran perusahaan berbarengan dengan perampasan tanah-tanah petani yang dikuasai secara tradisional. Sudah tersedia studi-studi awal tentang praktik-praktik perampasan tanah, karena kegiatan penambangan dan pembangunan infrastruktur penunjang seperti bendungan PLTA, pemukiman, hingga pembangunan lapangan golf.<sup>153</sup>

Tetapi, peristiwa paling kontroversial selama hampir 20 tahun adalah pengusuran petani-petani kecil di Morowali. Dari pertengahan 1990-an, terjadi konflik dengan petani setelah PT. Inco melakukan kegiatan eksplorasi di atas lahan pertanian dan perkampungan para petani di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur. Para petani adalah transmigran asal Jawa, Bali, dan Lombok yang ditempatkan oleh pemerintah di atas wilayah KK Inco, awal 1990-an. Setelah menjadi masalah, pemerintah hendak merelokasi petani peserta transmigrasi asal Jawa, Bali, dan Lombok itu ke Saembawalati, sebuah lokasi kurang subur sekitar 9.500 hektar di dekat Tomata, Kecamatan Mori Atas, Morowali. Para petani itu diproyeksikan akan bertani sawah di sana. Karena wilayah itu pada umumnya adalah rawa, maka pemerintah terlebih dahulu melakukan reklamasi.<sup>154</sup> Sejak 1995, pemerintah

---

Beluk Sengketa Tanah di Toili", *Seputar Rakyat*, edisi I (2010), 3-5.

<sup>151</sup> Sangaji, "Transisi Kapital di Sulawesi Tengah: Pengalaman industri perkebunan kelapa sawit", 15.

<sup>152</sup> Salah satu di antaranya adalah PT. Citra Palu Mineral (CPM) yang mengantongi konsesi seluas 561.050 hektar di Kota Palu dan beberapa kabupaten sekitarnya. Tentang konflik kehadiran PT. CPM, lihat Anonymous, "Sulawesi Communities Reject Rio Tinto's CPM Mine", *Down to Earth*, No. 53/54 (2002).

<sup>153</sup> Lihat Robinson, *Stepchildren of Progress*; George Y. Aditjondro, "Dapatkah Soroako dan Tembagapura menjadi Pusat Perkembangan Daerah?", *Prisma*, 8, Agustus (1982); Ferdi Nggao, "PT. Inco di Soroako: Berkah atau laknat." *Andal*, No 8 (1990).

<sup>154</sup> Pada pertengahan Juni 1997, Pimpinan Proyek Rawa Sub Dinas Pengairan Sulawesi Tengah mengklaim sudah berhasil mengeringkan rawa seluas 3.500 hektar dengan anggaran sebanyak IDR 4,6 miliar. Hingga akhir 1997, Kantor Wilayah Transmigrasi Sulawesi Tengah sudah siap memindahkan para transmigran ke areal seluas 1.200 hektar, dan berharap pada tahun anggaran berikutnya melakukan reklamasi areal seluas 2,300 hektar untuk penempatan transmigran gelombang berikutnya. Hingga 2000, pemerintah berencana akan mereklamasi 2.000 hektar lagi agar seluruh transmigran dapat dipindahkan. Arianto Sangaji, *Buruk Inco, Rakyat Digusur: Ekonomi politik pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002); Anonymous, "PU Dukung Reklamasi Rawa untuk Para Transmigran eks-Inco", *Bisnis Indonesia*, 19 Juni (1997); Anonymous,

mengajukan proyek relokasi ini senilai IDR 25 miliar. PT Inco akan membiayai IDR 13 miliar dan pemerintah Indonesia IDR 12 miliar melalui APBN.<sup>155</sup> Tetapi, proyek relokasi sendiri boleh dibilang berjalan tidak sukses. Dari sekitar 200 kepala keluarga yang sudah dipindahkan berdasarkan klaim pemerintah, ternyata hanya 46 KK berasal dari One Pute Jaya, sisanya berasal dari eks UPT Bahudopi. Proyek relokasi eks transmigran ini menjadi terbelenggal menyusul instabilitas ekonomi dan politik nasional, karena krisis kapitalisme yang melanda Asia Timur, termasuk Indonesia yang merontokkan regim Suharto.<sup>156</sup> Krisis lantas menimbulkan kekerasan bermotif etno-religius di Poso menyebabkan terjadi instabilitas regional khususnya di Poso.<sup>157</sup> Akibatnya, proyek relokasi terhenti. Bahkan, puluhan warga yang sudah dipindahkan ke Saembawalati juga terpaksa mengungsi ke Kolonodale ketika terjadi eskalasi kekerasan.<sup>158</sup> Akhirnya, proyek relokasi sisa eks transmigran dari One Pute Jaya dan Bahudopi ke wilayah itu tidak berlanjut. Sementara di One Pute Jaya, soal tanah juga menjadi rumit dan tidak terselesaikan. Sejak menjadi desa definitif pada 1997, mestinya para petani sudah memperoleh sertifikat tanah. Tetapi, dengan alasan lokasi transmigrasi tumpang tindih dengan wilayah KK PT. Inco, pemerintah tidak bersedia menyerahkan sertifikat.<sup>159</sup> Badan Pertanahan Nasional kemudian bersedia

---

“PT Inco Bayar Royalti Rp 7 milyar: 700 KK transmigran direlokasi ke Saembawalati”, *Mercusuar*, 9 September (1997).

<sup>155</sup> Tetapi, pada 1997, terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan Inco untuk membiayai proyek relokasi senilai IDR 12,1 miliar. Inco sendiri bersedia membiayai 7,6 miliar dan menyerahkan secara bertahap sesuai tahap kegiatan. Pemerintah Indonesia melalui APBN berkomitmen membiayai IDR 4,1 miliar. Belakangan Pemda Sulawesi Tengah meminta PT Inco meningkatkan kontribusinya menjadi IDR 17 miliar. Tetapi, perusahaan menolak dan hanya bersedia membayar IDR 13 miliar dan Rumengan Musu, pimpinan Inco mengakui sudah menyerahkan IDR 2,5 miliar untuk relokasi sekitar 200 KK ke Saembawalati. Anto Sangaji, “Inco: Rahmat atau petaka”, *Kertas Posisi* 02, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2001). Lihat juga Anonymous, “Biaya Relokasi Transmigran dari Bungku Rp, 11,8 miliar”, *Surya*, 10 Oktober (1996); Anonymous, “PT Inco Temui Gubernur: Rp 7 miliar segera dicairkan”, *Surya*, 15 November (1996); Anonymous, “Pemda Sulteng dan PT Inco Sepakat: Transmigran dari Bungku segera pindah”, *Surya*, 23 September (1997); Anonymous, “PT Inco Diminta Siapkan Rp 17 Miliar”, *Mercusuar*, 26 Juli (2001); Anonymous, “Inco Hanya Bersedia Bayar Rp 13 Miliar”, *Suara pembaruan*, 14 Februari (2002).

<sup>156</sup> Tentang krisis di Asia Timur yang berakar pada kontradiksi kapitalisme, Lihat Paul Burkett, and Martin Hart-Landsberg, *Development, Crisis, and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia*, (New York: St. Martin's Press, 2000). Tentang krisis tersebut yang kemudian menjungkir-balikkan regim Suharto lihat Kees van Dijk, *A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000*, (Jakarta: KITLV, 2001).

<sup>157</sup> Eskalasi kekerasan yang meluas di wilayah itu bertahun-tahun yang mengakibatkan ratusan orang mati, ratusan lainnya cedera, ribuan bangunan terbakar, dan puluhan ribuan orang mengungsi. Tentang kekerasan komunal di Poso, lihat Aragon, Dave McRae, *A Few Poorly Organized Men: Interreligious violence in Poso, Indonesia*. (Leiden, Boston: Brill, 2013); Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007); Arianto Sangaji, “The Security Forces and Regional Violence in Poso”, in Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, eds., *Renegotiating Boundaries: Local politics in Post-Suharto Indonesia*, (Leiden: KITLV, 2007).

<sup>158</sup> Sangaji. *Buruk Inco Rakyat Digusur*.

<sup>159</sup> Pada 2001, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah, Ir Chairul Basri Achmad membatalkan penyerahan sertifikat tanah kepada para transmigran, karena tumpang tindih lahan mereka dengan KK Inco. Menurutnya, BPN membatalkan sertifikat tersebut berdasarkan instruksi dari Gubernur Sulawesi Tengah, Aminudin Ponulele. Hingga pertengahan 2005, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah mengakui belum menyerahkan 3.728 sertifikat lahan untuk 1.246 KK karena belum jelas penyelesaian kasus tumpang tindih KK dengan transmigrasi. Lihat Anonymous, “BPN Sulteng Batalan Sertifikat Tanah yang Terkena Konsesi Inco”, *Suara Pembaruan*, 7 Agustus (2001); Anonymous, “Notulensi Pertemuan Pembahasan Tumpang Tindih Lahan KK PT Inco dan Lahan Transmigran di Kecamatan Bungku



menyerahkan sertifikat lahan pada 2007 hanya setelah muncul perlawanan para petani bertahun-tahun. Kasus One Pute Jaya adalah contoh paling buruk dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan kacau balau antar sektor, selain merupakan gambaran rumit tentang perampasan tanah, yang sangat membebani petani-petani kecil.

Gelombang baru perampasan tanah terjadi beriringan dengan kehadiran perusahaan-perusahaan tambang nikel, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sejak 2009. Kita kenal, aktivitas pertambangan, dalam kasus nikel *laterite*, menggunakan metode penambangan terbuka melalui pembersihan lahan/hutan (*land clearing*), pembuatan jalan, dan pengupasan dan pembuangan tanah penutup. Tidak bisa dihindari, aktivitas-aktivitas seperti ini menimbulkan efek luas terhadap petani-petani kecil subsisten. Efek paling utama adalah perampasan langsung lahan-lahan pertanian, jika lahan mereka tumpang tindih dengan areal konsesi. Tak kalah penting adalah para petani kehilangan akses untuk memungut hasil hutan, karena kegiatan penambangan dan infrastruktur pendukung seperti jalan berlangsung di tengah-tengah hutan. Sejak penerbitan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terjadi percepatan laju perampasan tanah melalui tangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. UU ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan IUP. Sebagian pemerintah daerah melakukannya sebagai bagian dari strategi peningkatan sumber pendapatan yang sah, tetapi sekaligus kerap menjadi sumber pendapatan ilegal melalui pemerasan oleh, dan penyogokan kepada, para pejabat daerah.<sup>160</sup> Khusus di Sulawesi Tengah, hingga Februari 2014, data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM memperlihatkan jumlah IUP dan KP yang sudah diterbitkan mencapai 443, di mana 199 di antaranya adalah IUP non-C&C. Jumlah IUP terbanyak terletak di Kabupaten Morowali, yakni mencapai 204 dengan 87 di antaranya non-C&C. Masifnya penerbitan IUP jelas berimplikasi pada praktik-praktik perampasan tanah dan konsentrasi penguasaan tanah di tangan kelas kapitalis. Dalam kasus Morowali, hingga Mei 2011, pemerintah daerah di sana sudah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) lebih dari 400 ribu hektar (lihat **Tabel 2**). Kendati sebagian di antara perizinan itu tumpang tindih satu dengan yang lain, tetapi sekurang-kurangnya menunjukkan terjadi konsentrasi penguasaan lahan di tangan segelintir pengusaha tambang.

**Tabel 2:** Luas IUP di Kabupaten Morowali hingga Mei 2011 (dalam hektar)

	IUP Produksi	IUP eksplorasi	Jumlah
Nikel	73130	314444	387574
Biji Besi	-	3292	3292
Kromit	9837	18612	28449
Mangan	-	623	623
Emas	-	2618	2618

Tengah Kabupaten Morowali”, Makassar, Quality Hotel, 8 Agustus (2005).

<sup>160</sup> Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, hingga Februari 2014, pemerintah sudah menerbitkan 10.918 IUP, terdiri dari 6.996 IUP mineral dan 3.922 IUP batubara. IUP produksi mencapai 5.416, yang meliputi 4.030 IUP mineral dan 1.386 IUP batubara. Dari keseluruhan IUP tersebut, status clear and clean (C&C) mencapai 6.041, mencakup C&C IUP mineral sebanyak 3.580 dan IUP batubara sebanyak 2.461. Sisanya, IUP non-C&C mineral adalah 3.416 dan IUP non-C&C batubara adalah 1.461.

Jumlah	82967	339589	422556
--------	-------	--------	--------

Sumber: Diolah (Kementerian ESDM, 2011)

Penghancuran usaha pertanian tradisional tidak selalu berlangsung melalui perampasan tanah. Bencana alam karena aktivitas penambangan merupakan penyebab lain. Seperti sudah disebutkan, dalam kasus nikel *laterite*, kegiatan penambangan secara langsung mengubah bentangan alam, karena mensyaratkan pembongkaran hutan dan penggalian lahan.<sup>161</sup> Oleh karena itu, penambangan nikel berpotensi merusak lahan-lahan pertanian, karena terjadi perubahan ekosistem lokal. Pada umumnya kegiatan penambangan berlangsung di bagian hulu, sementara lahan pertanian dan pemukiman petani terletak di hilir. Di musim hujan, banjir berlumpur kerap menghancurkan lahan-lahan pertanian. Jadi, tanpa perampasan tanah sekalipun, metode penambangan terbuka dapat meluluh-lantakan lahan pertanian. Di Morowali, pengalaman buruk seperti ini sudah berulang. Contohnya, CV. Tridaya, salah satu pemegang IUP produksi di sana, yang menambang di hulu. Di hilir, para petani di Desa One Pute Jaya menerima lumpur. Soalnya, di musim hujan, lumpur memenuhi sungai yang merupakan sumber air sawah-sawah petani di desa itu. Juni 2012, lumpur bahkan menggenangi sekitar tujuh hektar sawah yang terletak dekat aliran sungai. Akibatnya, beberapa petani gagal memanen atau memperoleh hasil panen yang rendah. Mereka mengakui kejadian ini tidak pernah terjadi sebelum marak kegiatan penambangan. Kendati hujan mengguyur sehari-hari.<sup>162</sup> Soal sama juga menimpa sekitar 200 kepala keluarga Desa Bahumakmur, Kecamatan Bahudopi. Awal Agustus 2010, banjir merendam sebagian desa, sawah, dan kebun, serta menghancurkan jaringan air bersih desa eks transmigrasi itu. Para petani menuding kegiatan penambangan PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), salah satu pemegang IUP terluas di Morowali, sebagai penyebab banjir. Sebenarnya, untuk mencegah atau meminimalisir dampak pengrusakan lingkungan, pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang melakukan reklamasi paska tambang, tetapi hanya sedikit yang menaatinya.<sup>163</sup> Bahkan, pemerintah sudah menyimpulkan bahwa

<sup>161</sup> Kita tahu, tahap-tahap penambangan adalah pembersihan permukaan tanah (*land clearing*), disusul penggalian dan pemindahan lapisan tanah penutup (*strip overburden*) deposit, lalu pemindahan atau pembuangan lapisan tanah penutup (*dispose overburden*). Kegiatan penambangan nikel *laterite*, oleh karena itu, merusak lingkungan alam secara langsung melalui pembongkaran hutan, penggalian dan pembuangan tanah. Kendati perusahaan-perusahaan mengklaim melakukan program pemulihan lingkungan termasuk melakukan revegetasi setelah penambangan, tetapi pengrusakan lingkungan alam sama sekali tidak bisa dihindari sebarang kecilnya *jarak waktu* antara kegiatan penambangan dengan kegiatan rehabilitasi lahan. Karena sistem produksi kapitalis mensyaratkan produksi komoditi sebanyak-banyaknya dan dalam tempo secepat-lekasnya, maka kegiatan penambangan nikel mensyaratkan pengrusakan alam yang kian luas dan cepat. Karena, kegiatan-kegiatan *land clearing*, *strip overburden*, dan *dispose overburden* mesti berlangsung dengan skala yang luas dan cepat pula.

<sup>162</sup> Adi Putra, "Tambang Datang Petani Mengerang", *Seputar Rakyat*, No 5 (2012), 6-9.

<sup>163</sup> Setelah perusahaan-perusahaan berhenti operasi menyusul larangan ekspor mineral mentah, kita menyaksikan perusahaan-perusahaan meninggalkan begitu saja lubang-lubang bekas galian begitu saja. Pada umumnya perusahaan-perusahaan pemegang IUP produksi di Morowali tidak melakukan kegiatan reklamasi setelah larangan itu. Kementerian ESDM sendiri tidak memiliki data tentang jaminan reklamasi dari 204 pemegang IUP di kabupaten itu. BDM adalah salah satu pengecualian. Mengunjungi lokasi bekas penambangan di blok 5 (kilometer 30) dan blok 2A, perusahaan telah melakukan reklamasi, memiliki *nursery*, dan sudah melakukan kegiatan revegetasi dengan tanaman utama sengon. Hingga saat ini, perusahaan mengakui sudah menanam kembali di bekas areal penambangan seluas 120 hektar. Fihak perusahaan mengklaim menggelontorkan dana sekitar IDR 800 juta untuk membiayai kegiatan reklamasi

kegiatan pertambangan nikel di Morowali telah merusak lingkungan alam.<sup>164</sup> Tetapi, penegakan hukum di bidang ini menjadi sulit karena kepentingan koruptif yang melibatkan elit politik lokal dan aparat penegak hukum di sana.

*Minyak dan gas.* Praktik-praktik penyingkiran petani dan nelayan juga marak terjadi di tengah-tengah ekspansi perusahaan-perusahaan minyak dan gas di provinsi ini. Kerja sama Pertamina dan Medco Energy, Joint Operating Body Pertamina-Medco E & P Tomori Sulawesi (JOB-PMTS), dalam pengolahan minyak di lapangan Tiaka, Blok Toili, di Teluk Tolo, Morowali merupakan satu contoh. Sejak aktivitas eksplorasi, operasi perusahaan minyak di sana telah menyingkirkan akses nelayan kecil terhadap areal penangkapan ikan yang kaya di terumbu karang Tiaka. Soalnya, perusahaan sudah mereklamasi terumbu karang itu dan menyulapnya menjadi sebuah pulau seluas 4,375 hektar.<sup>165</sup> Akibatnya, para nelayan kecil dari desa Kolo Bawah, Morowali Utara, yang menggantungkan sumber pendapatan utamanya dari hasil penangkapan ikan di Tiaka paling terpukul. Sejak penimbunan terjadi, kendati dilarang mendekati pulau buatan itu, para nelayan tetap menolak. Tetapi, mereka mengakui bahwa hasil penangkapan ikan merosot tajam, sejak reklamasi karang. Menurut pengakuan para nelayan kepada aktivis Lian Gogali, jika sebelumnya, setiap nelayan dapat memperoleh 15 kilogram ikan perhari, maka setelah reklamasi karang, setiap nelayan hanya bisa meraup sekitar 5 kilogram. Gogali mengklaim nilai ekonomis dari perdagangan hasil tangkapan ikan ratusan nelayan tradisional dari desa-desa di sekitar proyek tersebut yakni Kolo Bawah, Baturube, dan Pandauke berkisar

---

pada setiap hektar lahan bekas tambang. Perusahaan menargetkan pada 2014 dapat merampungkan reklamasi lahan hingga mencapai 150 - 200 hektar. Hengjaya yang menambang di kawasan hutan di sisi jalan trans Sulawesi antara Desa Bete-bete, Kecamatan Bahudopi dengan Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir terlihat melakukan reklamasi dan revegetasi secara serampangan. Ketika mengunjungi lokasi bekas penambangan di ketinggian 309 meter di atas permukaan laut (dpl), sekitar 3 kilometer dari *jetty* perusahaan di Desa Tangofa, saya menyaksikan perusahaan hanya menancapkan anakan pohon gamal di atas gundukan tanah yang berbatu. Tampak perusahaan hanya melakukannya beberapa saat sebelum larangan ekspor 12 Januari 2014.

<sup>164</sup> Sebuah tim yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, yang telah melakukan verifikasi lapangan sebanyak dua kali di Morowali, menemukan fakta bahwa 15 perusahaan tambang pemegang IUP telah menimbulkan pencemaran air muara dan perairan laut di Morowali. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT. Sumber Permata Selaras, PT. Hoffmen International, PT. Global Samudra Atlantik, PT. Integra Service, PT. Integra Teknologi Nusantara, CV. Surya Amindo Perkasa, PT. Cipta Utama Meranti, PT. Rizki Utama, PT. Sulawesi Resources, CV. Tridaya Jaya, PT. Ang and Fang Brother, PT. Kayu Kreasi Meredian, PT. Bangun Bumi Indah, PT. Citra Perkasa Sejati, dan PT. Graha Sumber Mining. Kementerian LH menganggap bahwa perusahaan-perusahaan itu telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pertengahan November 2013, Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Surat Nomor B-12847/Dep.V/LH/HK/11/2013 tentang rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan penambangan nikel di Morowali, lantas meminta Bupati Morowali untuk menutup sementara waktu kegiatan operasi perusahaan-perusahaan itu.

<sup>165</sup> Lihat Anonymous, "Produksi Perdana Lapangan Minyak Tiaka", *Buletin Pertamina*, edisi No 38/XL, 19 September (2005). Perusahaan telah memproduksi minyak mentah dari Lapangan Tiaka, sejak 31 Juli 2005. Produksi awal minyak mentah lapangan tersebut hanya sekitar 1.200 barrel per hari (bph), tetapi kapasitas produksi akan terus ditingkatkan menjadi 5.000 bph. Pengapalan perdana produksi minyak mentah berlangsung 12 Januari 2006, dengan mengirim 75.000 barrel ke kilang Pertamina Plaju. Anonymous, "Sulawesi Mulai Kirim Minyak", *Kompas*, 13 Januari (2006).

IDR 16,4 milyar setiap tahun.<sup>166</sup> Di Banggai, proyek gas alam cair (LNG) Dongi-senoro, dikelola PT. Dongi-Senoro LNG, dengan investasi yang menyertakan perusahaan transnasional asal Jepang, Mitsubishi Corporation, juga menuai banyak masalah perampasan tanah milik petani-petani kecil.<sup>167</sup>

## b) Penciptaan kelas pekerja bebas

Marx membedakan kelas pekerja dari aktif (*active army*) dengan tenaga kerja cadangan (*reserve army of labour*) atau kelebihan penduduk relatif (*relative surplus population*), yang bersifat mengambang (*floating*), tersembunyi (*latent*), dan stagnan (*stagnant*). Tenaga kerja cadangan adalah tenaga kerja yang diciptakan dan dipertahankan melalui akumulasi kapital. Disebut tenaga kerja cadangan atau kelebihan penduduk relatif, karena mereka sedang tidak terserap oleh kebutuhan kapital untuk dipekerjakan sebagai kelas pekerja aktif, tetapi potensial dapat atau akan dimanfaatkan jika diperlukan.<sup>168</sup> Dalam kapitalisme, buruh upahan yang sedang bekerja, atau pekerja aktif, tidak dapat dipisahkan dari lautan massa manusia yang tidak sedang bekerja sebagai buruh upahan, atau tenaga kerja cadangan. Kelas kapitalis selalu mengeksploitasi kelas pekerja aktif dengan mengalkulasi tenaga kerja cadangan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja cadangan, semakin tinggi tingkat eksploitasi terhadap kelas pekerja aktif. Karena, tenaga kerja cadangan akan mempertahankan suplai tenaga kerja sehingga mencegah harga tenaga kerja, atau upah, melonjak di atas nilai tenaga kerja. Dengan demikian, keberadaan tenaga kerja cadangan memperkuat posisi kelas

---

<sup>166</sup> Lian Gogali "Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan investor", *Kertas Posisi* 06, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2007), 13-5.

<sup>167</sup> Ketika berlangsung pembangunan kilang dan fasilitas pendukung proyek tersebut, perusahaan menggusur tanah-tanah pertanian milik petani di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Kisah tragis menimpa keluarga Habel Saluga. Pada 12 April 2011, sekelompok warga yang mengklaim sebagai pasukan adat bersama aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Batui dan seorang anggota TNI mendatangi lokasi perkebunan milik keluarga Habel. Mereka memerintahkan keluarga tersebut mengosongkan lokasi perkebunan itu dan menyatakan bahwa tanah tersebut akan dibayarkan. Takut, keluarga Habel lantas meninggalkan lahan yang sudah dikuasai puluhan tahun itu. Di hari berikutnya, kuasa hukum PT. DS-LNG berusaha melakukan negosiasi dengan keluarga Habel. Di atas tanah-tanah itu terdapat puluhan pohon kelapa, tanaman buah-buahan, dan tanaman pangan. DS-LNG mengklaim bahwa mereka sudah membayar tanah sengketa itu kepada pihak lain yang berhak atas tanah itu. Padahal, sebelumnya Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar di bawah penguasaan Habel Suluga. Lihat Budi Siluet, "Kisah Pilu Eksploitasi PT DSL NG", *Seputar Rakyat*, No 03 (2012), 16-9; Muhajir Aljazara, "Donggi Senoro Mengorbankan Petani Kecil", *Seputar Rakyat* No 03 (2012), 20-23; tentang investasi Mitsubishi lihat Afif Maulana D, Dian Sari Pertiwi & Erie W. Adji, "Babak Baru Mitsubishi Corporation di Indonesia", *Fortune Indonesia*, Volume 66, 7 Juli (2013), 44-51; tentang proyek PT. DS-LNG lihat Danel Lasimpo, "Dongi-Sinoro untuk Siapa?", *Kertas Posisi* No 9, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2011).

<sup>168</sup> Marx membedakan tiga bentuk tenaga kerja cadangan. *Pertama*, tenaga kerja cadangan *mengambang*, yakni mereka yang saat ini bekerja tetapi tidak memiliki kepastian untuk bekerja lagi di hari berikutnya. *Kedua*, tenaga kerja cadangan *tersembunyi*, yakni para pekerja yang sedang bekerja, tetapi di sektor-sektor yang terkebelakang dan dalam kondisi keadaan kerja yang buruk. Para pekerja ini selalu siap untuk berpindah mencari pekerjaan-pekerjaan alternatif. Mereka terutama berasal dari sektor pertanian yang setiap saat dapat didorong untuk menjual tenaga kerjanya, misalnya, karena tingkat produktivitas yang rendah, tingkat eksploitasi yang tinggi, dan pendapatan atau upah yang rendah. Atau, karena tanah-tanah pertanian mereka dirampas. Terakhir, tenaga kerja cadangan stagnan, yakni orang-orang yang tergolong sebagai *lumpenproletariat* (pengemis, tunawisma, pelaku kriminal jalanan, pelacur jalanan, dll). Lihat Marx, *Capital Volume I*, 794-9.

kapitalis.

Secara empiris, jumlah kelas pekerja - dalam pengertian yang longgar<sup>169</sup> - di Indonesia meningkat tajam dari 13,6 juta (1971) menjadi 52,9 juta (2013). Dilihat dari segi persentase pekerja terhadap total angkatan kerja maka terjadi peningkatan sebesar 10,71 persen, yakni 33 persen pada 1971 menjadi 43,71 persen 2013.<sup>170</sup> Sejak sektor paling modern dalam produksi kapitalis adalah industri pengolahan, maka **Tabel 3** mengonfirmasi perkembangan kapitalisme yang tidak merata (*uneven development*). Di tengah proses industrialisasi di Indonesia, Sulawesi Tengah adalah daerah marginal. Persentase Sulawesi Tengah lebih baik dari rata-rata nasional terdapat di sektor pertanian, pertambangan, dan jasa kemasyarakatan. Dengan mengabaikan jasa kemasyarakatan yang notabene merupakan sektor tidak produktif (*unproductive sector*), maka kita perlu memberi perhatian secara hati-hati dan kritis terhadap 'proletarianisasi' di sektor pertambangan dan pertanian.

**Tabel 3:** Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Tengah dan Indonesia (2011)

Lapangan Pekerjaan Utama	Sulawesi Tengah	Indonesia
Pertanian	83381 (20,64)	8466529 (17,31)
Pertambangan dan galian	14394 (3,56)	1019624 (0,22)
Industri pengolahan	20168 (4,99)	9264354 (18,95)
Listrik, gas, dan air	1608 (0,39)	219667 (0,44)
Bangunan	39814 (9,85)	5486421 (11,22)
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	22967 (5,68)	5864596 (11,99)
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	24095 (5,96)	2462321 (5,03)
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	12697 (3,14)	2234916 (4,57)
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	184732 (45,74)	13869810 (28,37)

<sup>169</sup> Karena pengertian di sini menggunakan pengertian dan data BPS, maka kita perlu dengan hati-hati mengerti konsep tentang kelas pekerja. Karena pengertian tentangnya tidak sepenuhnya bermakna hubungan-hubungan produksi kapitalis, karena pengertian kelas pekerja di sini mencakup (a) "pekerja bebas", yakni, pekerja yang mempunyai majikan/orang/institusi *tidak tetap* dalam satu bulan terakhir, dengan memperoleh upah (uang atau barang) di sektor pertanian dan non-pertanian dan; buruh/karyawan/pegawai, yakni, seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan, dalam satu bulan (3 bulan untuk bangunan) terakhir secara tetap, dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang dan Lihat BPS, *Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2013*, (Jakarta: BPS, 2013), xii.

<sup>170</sup> Lihat Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 1971)*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1974), 186-7; Badan Pusat Statistik, *Keadaan Pekerja Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 92.

Jumlah	403856	48888238
	(100)	(100)

Sumber: BPS (2011).

*Sektor pertambangan.* Proletarianisasi di sektor ini terjadi setelah ledakan pertambangan nikel di provinsi ini, khususnya di Kabupaten Morowali, sejak 2009. Tetapi, sejak pertambangan adalah sektor padat teknologi yang hemat tenaga kerja, maka, dalam konteks akumulasi primitif, proses perampasan tanah dan penghancuran pertanian tradisional tidak berjalan seiring dengan pembentukan kelas pekerja aktif (*active army*) dalam jumlah signifikan. Proses perampasan tanah menyusul kehadiran industri pertambangan hanya melahirkan limpahan *tenaga kerja cadangan tersembunyi* di pedesaan. Proses perampasan tanah di pedesaan hanya menghasilkan sedikit petani yang sudah atau berpotensi kehilangan tanah beralih menjadi kelas pekerja. Bahkan, pada umumnya mereka yang menjadi kelas pekerja hanya direkrut untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mensyaratkan ketrampilan tinggi.<sup>171</sup> Khusus di Morowali, di mana terjadi pertumbuhan industri pertambangan paling progresif dibanding daerah manapun di Sulawesi Tengah, maka pada 2013, berdasarkan data resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, jumlah pekerja tambang di sana hanya sekitar 3.000 orang. Tetapi, tampaknya angka itu jauh lebih sedikit dari data sebenarnya, karena banyak perusahaan tambang tidak melaporkan jumlah pekerja secara benar untuk menghindari dari berbagai kewajiban kepada pemerintah. Awal 2014, Spartan (Solidaritas Pekerja Tambang) mengklaim jumlah pekerja tambang di Morowali mencapai lebih dari 7.000 orang. Mereka selain berasal dari Morowali, pada umumnya berdatangan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dll. Perusahaan-perusahaan tambang merekrut para pekerja dari luar dengan keahlian dan ketrampilan lebih baik dibanding mempekerjakan para pekerja dari desa-desa di sekitar areal pertambangan yang hanya berlatar-belakang sebagai petani tradisional. Perusahaan hanya mengangkat para pekerja dari penduduk desa untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mensyaratkan keahlian dan ketrampilan tinggi. Ini menunjukkan bahwa kehadiran industri pertambangan tidak sertamerta melahirkan proletarianisasi masif terhadap petani-petani kecil di Morowali. Padahal, para petani itu adalah pihak yang paling dirugikan akibat aktivitas pertambangan, baik karena perampasan tanah maupun karena efek-efek ekologis. Tentu saja, cerita ini mengulangi kisah yang terjadi dalam kasus-kasus industri pertambangan di tempat lain seperti PT. Freeport di Papua<sup>172</sup> dan PT Inco di Sorowako, Sulawesi Selatan.<sup>173</sup>

<sup>171</sup> Pada 2000-2001, ketika berlangsung proyek eksplorasi minyak dan gas di desa Sinorang, Banggai, Pertamina-Medco hanya mengangkat sekitar 60 penduduk dari desa itu dan beberapa desa tetangga sebagai buruh kasar dan tenaga satuan pengamanan (Satpam). Begitu juga di Tiaka, ketika proyek penimbunan dan infrastruktur sudah selesai dibangun, perusahaan merekrut 12 satpam, masing-masing 8 orang berasal dari Pandauke dan 4 orang dari Kolo Bawa untuk menjaga areal itu. Lihat Anonymous, "Masyarakat Sinorang VS. Pertamina-Expan-Medco", *Kumpulan Gali-Gali*, Edisi 1-15, September (2001), 55-6; Gogali, "Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur", 15.

<sup>172</sup> Di Papua, misalnya, pada awal operasinya, PT. Freeport hanya mempekerjakan ratusan pekerja asal Manado, ratusan dari Makassar, hampir 3.000 pekerja dari Jawa, termasuk pasokan buruh murah yang bersumber dari program transmigrasi. Lihat Leith, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*, 119; Lihat juga Marr, *Digging Deep: The hidden costs of mining in Indonesia*, 81.

<sup>173</sup> Di Sorowako, tetangga Morowali, pada awal kehadirannya, PT. Inco mengerahkan tenaga kerja terlatih dari Jawa, Makassar, Toraja, Manado, dll, sementara penduduk di Sorowako dan sekitarnya dipekerjakan dalam

Kendati kehadiran perusahaan-perusahaan tambang di Morowali juga telah menciptakan kelas pekerja aktif, tetapi bukan tanpa resiko sama sekali. Dan resiko itu tertanam dalam *logik internal* kapitalisme sendiri. Resiko pertama adalah karena ketidakpastian kerja dalam jangka panjang. Pada umumnya, di bawah logik pasar tenaga kerja neoliberal yang fleksibel, perusahaan-perusahaan tambang nikel di Morowali mempekerjakan para buruh melalui kontrak kerja jangka pendek. Pada umumnya, para pekerja mengikat kontrak dengan perusahaan di bawah skema perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) untuk masa kerja yang singkat. PKWT dapat diperpanjang jika kedua belah menyepakatinya. Melalui skema ini, perusahaan-perusahaan dapat mengeksploitasi kaum buruh lebih dalam dengan mengambang status mereka. Hari ini kelas buruh dapat bekerja, tetapi belum tentu mereka kembali ke pabrik di hari berikutnya. Resiko kedua, industri pertambangan nikel yang kompetitif dengan tingkat konsentrasi dan sentralisasi yang tinggi di tangan segelintir kelas kapitalis transnasional menjadikan kelas pekerja tambang di perusahaan-perusahaan kecil sangat rentan. Mereka bakal dengan mudah terdepak dari tempat kerja, ketika perusahaan-perusahaan, di mana mereka bekerja, kalah dalam kompetisi kapitalis yang anarkis. Kebijakan pemerintah Indonesia melarang perusahaan-perusahaan tambang mengeksport biji nikel pada pertengahan Januari 2014,<sup>174</sup> telah membuat hampir semua perusahaan pemegang IUP di Morowali menghentikan operasi. Perusahaan-perusahaan tambang pemegang IUP di sana lantas memecat ribuan buruh setelah keluar beleid pemerintah itu.<sup>175</sup> Kita menyaksikan dari keseluruhan cerita tentang industri pertambangan di Morowali adalah bahwa kaum buruh sangat beresiko di balik anarkisme produksi kapitalis. Dalam sistem produksi ini, status kelas pekerja adalah '*in between*', sebagai tenaga kerja aktif (*active army*) dan sebagai tenaga kerja cadangan (*reserve army of labour*).

*Sektor pertanian.* Dari keseluruhan sub-sektor di pertanian, kita patut menyoroti perkebunan kelapa sawit, karena sektor ini paling berpotensi menyerap kelas pekerja aktif dalam jumlah signifikan. Faktanya, nafas sektor ini sangat bergantung kepada eksploitasi vulgar terhadap *tenaga kerja cadangan tersembunyi*. Untuk itu, kita perlu mengenali secara umum anatomi kelas pekerja dalam industri ini. Bisnis kelapa sawit merupakan usaha padat karya (*labour intensive*). Sebagai ilustrasi, pada 2009, merujuk ke data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut jumlah tenaga kerja di bisnis kelapa sawit Indonesia mencapai 3,6 juta dengan 2,7 juta di antaranya berkerja di perkebunan sawit. Menyadari perkebunan kelapa sawit bersifat padat karya dengan beban ongkos buruh yang besar, maka melalui *skema inti-plasma*, kelas

---

jumlah sangat terbatas dan dalam posisi pekerjaan paling rendah. Lihat Robinson, *Stepchildren of Progress*.

<sup>174</sup> Pada tanggal 12 Januari 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemegang KK dan IUP produksi untuk melakukan pengolahan biji di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan tambang tidak bisa lagi mengeksport biji nikel tanpa diolah.

<sup>175</sup> Kuswandi, Ketua Presidium Spartan, mengklaim bahwa semenjak penghentian ekspor biji nikel 12 Januari 2014, 27 perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5.400 buruh. Komunikasi personal dengan Kuswandi melalui telepon pada 4 Februari 2014. Lihat juga Ivan, "Dampak UU Minerba: 5.400 buruh tambang dipecat", *Sulteng Post*, 25 Januari (2014). Aim K. Lagunasa, aktivis SPARTAN lain, mengklaim bahwa hingga awal Februari 2014, sudah terjadi PHK terhadap 7.000 pekerja tambang di Morowali. Menurutnya, angka itu akan terus bertambah, karena Spartan sedang melakukan perhitungan setiap hari. Komunikasi personal melalui telepon, 4 Februari 2014.

kapitalis secara efektif dapat menekan resiko ongkos buruh. Mereka melepas tangan dari beban ongkos tenaga kerja dalam produksi kebun plasma. Ongkos buruh menjadi beban petani plasma, entah dengan membayar buruh harian atau mengerahkan anggota keluarga (termasuk perempuan dan anak-anak di bawah usia kerja) secara gotong-royong. Sebaliknya, kelas kapitalis mengontrol produksi kebun plasma dengan menciptakan ketergantungan para petani plasma di bawah skema kredit dengan beban bunga utang, penyediaan bibit dan pupuk, dan pemasaran tandan buah segar (TBS). Apa yang kita saksikan adalah kelas kapitalis mempertahankan petani-petani plasma dan para buruh yang bekerja di kebun-kebun plasma sebagai *tenaga kerja cadangan tersembunyi*. Dengan demikian, kelas kapitalis mengeruk super profit tidak melalui eksploitasi langsung terhadap kelas pekerja aktif, tetapi melalui instrumen kredit dan perdagangan yang menyubordinasikan petani plasma.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit benar-benar menjadi lumbung tenaga kerja cadangan tersembunyi karena mempekerjakan para pekerja yang tergolong sebagai *semi-proletar*. Pengamatan saya terhadap buruh-buruh harian lepas (BHL) yang dipekerjakan di PT. HIP di Buol menunjukkan bahwa mereka adalah petani-petani kecil eks transmigrasi yang dimobilisasi bolak-balik untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat musiman. Pada umumnya para petani ini memiliki lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka. Di Morowali, ketika terjadi relokasi sekitar 200 kepala keluarga petani dari UPT Bahudopi dan UPT Bahumotefe di akhir 1990-an ternyata menyimpan cerita tidak sedap. Di Saembawalati, lahan pertanian yang diharapkan dapat diolah para petani tidak berfungsi baik, karena kerap tergenang air terutama di musim hujan. Penyebabnya, daerah itu adalah bekas rawa yang disulap menjadi lokasi pemukiman. Karena nasib para petani di situ menjadi terkatung-katung, sebagian di antara mereka kemudian memilih kembali ke Jawa. Tidak punya pilihan lain, sebagian petani terpaksa menjual tenaga kerja secara musiman ke PT. Perkebunan XIV di Tomata, Beteleme, sekitar 50 kilometer dari Saembawalati. Mereka menjadi buruh kasar, dengan status buruh harian lepas di perusahaan perkebunan sawit milik pemerintah itu.<sup>176</sup> Bukan sebagai kelas pekerja modern, maka kelas pekerja cadangan tersembunyi ini, dengan demikian, menjadi obyek eksploitasi yang brutal dengan upah rendah, keadaan keselamatan kerja yang buruk, dan status kerja yang fleksibel di mana mereka dapat ditendang kapan saja dari tempat kerja jika tidak diperlukan.

Di luar perkebunan kelapa sawit, kita menyaksikan masih tersedia sebagian besar petani kecil di Sulawesi Tengah, yang dalam satu dan lain cara sudah atau sedang menghadapi proses perampasan tanah. Tetapi, mereka tidak serta-merta beralih menjadi kelas pekerja bebas, atau kelas buruh modern. Sebagian besar di antara mereka tetap bertahan sebagai petani produsen kecil yang mengandalkan pasokan tenaga kerja dari anggota keluarga. Mereka adalah petani subsisten dalam pengertian mengolah tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri. Juga mereka adalah petani produsen komoditas-komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao untuk memperoleh uang tunai. Sebagian besar petani lebih tepat dikelompokkan sebagai semi-proletar. Sebagian besar di antara mereka masih memiliki lahan pertanian milik keluarga kendati dalam jumlah yang tidak luas. Sistem pertanian tradisional, penggunaan tenaga kerja berbasis rumah tangga dan input teknologi

---

<sup>176</sup> Lihat juga Jeis Montesori S, "Konflik Rakyat-PT Inco: Sangkakala Maut Sang Gubernur", *Suara Pembaruan*, 26 Juni (2001); juga Anonymous, "PT Inco Diminta Siapkan Rp 17 M", *Mercusuar*, 26 Juli (2001).



yang tidak berkembang. Mereka menjual tenaga kerja karena keadaan pertanian dengan tingkat produktivitas yang rendah. Para petani ini jelas bukan dieksploitasi oleh kapitalisme, bukan juga feodalisme, tetapi berada dalam posisi transisi menuju kapitalisme. Marx menyebut "hybrid subsumption of labour" untuk menjelaskan masyarakat dalam fase transisi seperti ini. Tetapi harus diingat bahwa para petani ini tidak bersifat otonom atau terisolasi dari kapitalisme. Mereka terintegrasi dengan pasar global, di mana sebagian produksi dan konsumsi mereka bergantung, dengan kapitalisme sebagai corak produksi paling dominan. Para petani ini adalah tenaga kerja tersembunyi.

### c) Perlawanan terhadap akumulasi primitif

Setiap proses akumulasi primitif selalu diikuti dengan perlawanan terhadapnya. Geografi perlawanan itu terjadi di mana-mana, di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, di mana ekspansi kapital ke wilayah non-kapitalis terutama dengan kandungan mineral dan sumber daya alam lain yang kaya.<sup>177</sup> Di Indonesia, kendati banyak studi tentang perlawanan petani terhadap ekspansi kapital ke wilayah-wilayah non-kapitalis, tetapi boleh dibilang tidak ada literatur yang secara sistematis menggunakan konsep akumulasi primitif dan implikasi teoritik dan praktik perlawanan sebagai perjuangan kelas. Dalam skala nasional, dalam 30 tahun terakhir, kita bisa dengan begitu mudah menyaksikan melalui berbagai pemberitaan media atau laporan-laporan organisasi non-pemerintah tentang perlawanan petani dari Sabang sampai Merauke terhadap praktik-praktik perampasan tanah-tanah pertanian tradisional untuk kebutuhan industri berbasis sumber daya alam modern seperti perkebunan besar, pertambangan, dan minyak dan gas. Kendati tidak menggunakan konsep akumulasi primitif, beberapa studi memberikan informasi empiris yang kaya tentang perlawanan para petani terhadap proses itu.

Begitu juga dalam skala provinsi, Sulawesi Tengah, perlawanan terhadap proses akumulasi primitif sudah direkam secara detail melalui berbagai studi. Sejak dekade pertama 2000-an, kendati tidak menggunakan kerangka teori akumulasi primitif, sejumlah studi sudah menguraikan perlawanan-perlawanan petani. Antropologi Tania Li, merujuk ke Foucault, menggunakan konsep tentang 'power' dan 'governmentality' untuk menjelaskan tentang pendudukan Dongi-dongi di Taman Nasional Lore Lindu oleh Forum Petani Merdeka. Studi itu juga menjelaskan bagaimana organisasi non-pemerintah terbelah, dengan mendukung dan anti terhadap pendudukan itu.<sup>178</sup> Suardin Abdul Rasyid menggunakan Scott dan Popkins untuk meneropong perlawanan petani di dua desa terhadap penguasaan tanah dua perkebunan besar di Sulawesi Tengah.<sup>179</sup> Aditjondro memberikan informasi empiris yang kaya tentang perlawanan itu.<sup>180</sup> Selebihnya adalah laporan-laporan lapangan

---

<sup>177</sup> cf Gordon & Webber, "Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin America"; Holden, "The New People's Army and Neoliberal Mining in the Philippines: A struggle against primitive accumulation".

<sup>178</sup> Lihat Tania Li, "Situating Resources Struggles: Concepts for empirical analysis", *Economic and Political Weekly*, November 29 (2003).

<sup>179</sup> Suardin Abd. Rasyid, "Penguasaan Tanah Perkebunan dan Perlawanan Petani (Kasus dua desa di Sulawesi Tengah)", (Tesis Master, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2004).

<sup>180</sup> Lihat George Junus Aditjondro, "Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak pembangunan PLTA Poso & jaringan SUTET di Sulawesi Tengah", *Kertas Posisi*, No 3, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka,

organisasi non-pemerintah baik yang dipublikasi melalui kertas-kertas posisi, terbitan-terbitan berkala, maupun melalui berbagai bentuk selebaran dan pernyataan-pernyataan pers yang memuat deskripsi perlawanan-perlawanan itu.<sup>181</sup>

Perlawanan terhadap akumulasi primitif di Sulawesi Tengah terutama berlangsung di tingkat lokal, di lokasi di mana proses-proses perampasan tanah berlangsung. Berkat keterlibatan organisasi non-pemerintah, gerakan mahasiswa, dan organisasi-organisasi politik kiri yang berusaha meningkatkan memperluas perlawanan, membuat proses perlawanan berkembang ke tingkat regional, nasional, bahkan global.<sup>182</sup> Ada beberapa karakteristik dari perlawanan-perlawanan terhadap praktik akumulasi primitif. *Pertama*, dari segi metode, terlihat banyak cara, tetapi yang paling menonjol adalah aksi-aksi protes massa. Salah satu yang tergolong maju dalam aksi-aksi protes ini adalah aksi pendudukan dan pendudukan kembali tanah oleh para petani. Paling awal dalam kasus pendudukan kembali tanah di Sulawesi Tengah terjadi di PT. Hardaya Inti Plantation di Buol, pada 2000. Di sana, ratusan petani, tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB), dan didukung Yayasan Dopalak dan Walhi Sulawesi Tengah, melakukan pendudukan kembali lahan-lahan pertanian mereka yang sudah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan itu. Para petani lantas mengganti kelapa sawit dengan pohon kelapa, kakao, dan padi dan tanaman pangan lainnya. Sebelum kedatangan perusahaan, para petani mengklaim tanah-tanah itu adalah ladang dan kebun milik mereka. Di sana juga ditumbuhi pohon sagu, sumber makanan pokok mereka.<sup>183</sup> Sekitar setahun kemudian, terjadi salah satu aksi pendudukan tanah paling masif di Sulawesi Tengah. Ribuan petani, bekas peserta proyek pemukiman kembali penduduk di Dataran Palolo, menduduki tanah seluas sekitar 6.000 hektar di dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), di sisi jalan raya yang menghubungkan Dataran Tinggi Palolo di Kabupaten Sigi dengan Dataran Tinggi Napu di Kabupaten Poso. Mereka membongkar hutan dan menggantinya dengan aneka tanaman pangan, kakao, dll.<sup>184</sup>

---

2005); George Junus Aditjondro, "Ketika Petani Angkat Bicara dengan Suara dan Massa", *Kertas Posisi*, No 5, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2006).

<sup>181</sup> Lihat misalnya Anonymous, "Sulawesi Communities Reject Rio Tinto's CPM mine", *Down to Earth* No. 53/54, August (2002), 4-5; Anonymous, "6 Desa Boikot Perusahaan Tambang Galian C", *Bergerak*, edisi 13 (2002), 3-4; Anonymous, "Kronologi Aksi Tambang Galian C Komite Rakyat Korban Tambang (Terkam) Tanggal 19 Agustus 2002", *Berdikari*, edisi 13 (2002), 5-6. Anonymous, "Kronologi Aksi Pemblokiran Jalan Perusahaan di Kelurahan Watusampu 27 Agustus 2012", *Berdikari*, edisi 13 (2002), 7.

<sup>182</sup> Yang lain adalah keterlibatan mahasiswa dalam kasus PT. TGH. Pada 1997, para petani bersama-sama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Palu (FKMP), sekurang-kurangnya melakukan dua kali demonstrasi di Palu, dengan mendatangi DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah. Saat itu, mereka memprotes berbagai soal, dari kasus perampasan tanah, pembagian lahan yang tidak adil, hingga soal beban kredit yang diterima petani plasma. Lihat Anonymous. 1997. "DPRD Sulteng Didemo." *Mercusuar*, 11 Desember; Anonymous. 1997. "Petani dari Bungku Mengadu ke DPRD." *Surya*, 11 Desember. Salah satu studi paling awal tentang perlawanan petani terhadap TGK dilakukan oleh Firdaus. Dia mencatat bagaimana petani setempat menentang TGK sejak pertengahan 1990-an Firdaus, "Pola Hubungan Kerja antara Pemilik Modal dan Petani pada Proyek PIR - Trans PT. Tomaco Graha Krida di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Poso", (*Skripsi S-1*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, 2000), 72-6.

<sup>183</sup> Sangaji, "Transisi Kapital di Sulawesi Tengah: Pengalaman industri perkebunan sawit kelapa sawit", *Kertas Posisi* 08, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka), 15.

<sup>184</sup> Lihat Li, *The Will to Improve*; Li, "Situating Resources Struggles: Concepts for empirical analysis"; Tania Li dan Arianto Sangaji. 2003. "Perubahan Agraria di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu." *Seputar Rakyat*, 6, No 1 (2003).

Aksi-aksi massa protes langsung kerap disertai dengan kekerasan,<sup>185</sup> terutama sejak warga frustrasi dengan tuntutan-tuntutan mereka yang tidak terpenuhi. Apalagi aksi-aksi protes itu sudah berulang dilakukan dalam waktu yang panjang. Ini misalnya yang terjadi dengan para petani di One Pute Jaya dalam kasus Inco/Vale.<sup>186</sup> Agustus 2007, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), yang merupakan gabungan antara para petani, beberapa organisasi non-pemerintah, dan Partai Persatuan Nasional (Papernas) Kabupaten Morowali melakukan aksi di Bungku menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyerahkan sertifikat lahan petani One Pute Jaya. ARM juga menuntut Pemda Kabupaten Morowali untuk segera memberikan ganti rugi atas tanah petani yang terkena kegiatan eksplorasi. Mereka juga menuntut Inco mengutamakan pekerja lokal dalam kegiatannya di Morowali. Terakhir, ARM, melalui pernyataan sikap secara terbuka pada 2007, mengancam akan melakukan pendudukan kantor BPN Morowali dan memblokir aktivitas Inco jika keseluruhan tuntutan mereka tidak diterima. Menganggap tidak ada kemajuan berarti dari tuntutan-tuntutan yang sudah berulang dan bertahun-tahun disampaikan kepada pemerintah, ARM kembali melakukan aksi besar-besaran. 6 Februari 2012, massa melakukan aksi ke kamp Vale Indonesia di Kilometer 9, Desa One Pute Jaya. Mereka membakar kamp dan beberapa unit mobil milik perusahaan itu. Mereka memaksa perusahaan harus angkat kaki dari Morowali, karena warga menganggap dengan penguasaan lahan sekitar 36.000 hektar, Vale Indonesia merugikan para petani.<sup>187</sup> Sebelumnya, pertengahan Juni 2010, warga dari 11 desa yang

---

<sup>185</sup> Agar adil, penggunaan istilah kekerasan di sini harus dilihat sebagai reaksi terhadap “kekerasan sistemik” (*systemic violence*), yang kerap berlangsung secara terbuka, tetapi kerap berlangsung tidak kasat mata. Slavoj Žižek dengan baik sekali merumuskan kekerasan sistemik ini sebagai sesuatu yang tertanam dalam kapitalisme. Lihat [Slavoj Žižek](#), *Violence*, (New York: Picador, 2008), 9-15.

<sup>186</sup> Dalam kasus pertambangan, perlawanan paling panjang terjadi dalam rencana investasi Inco (sekarang PT Vale Indonesia) di Morowali. Di sana, aneka protes terhadap perusahaan tambang itu karena merusak kegiatan ekonomi non-kapitalis setempat sudah dilakukan berulang dan melibatkan banyak pihak. Para petani, baik dari Desa Bahumotefe maupun dari Desa One Pute Jaya, menentang kegiatan-kegiatan eksplorasi dan rencana pemindahan penduduk. Sejak pertengahan 1990-an, warga kedua desa berulang-kali melakukan protes kepada pemerintah, baik melalui surat resmi maupun aksi protes di jalanan dan gedung-gedung pemerintah. Dukungan terhadap para petani juga datang sejumlah cendekiawan asal Sulawesi Tengah di Yogyakarta. November 1995, dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, sebanyak 10 orang anggota Forum Cendekiawan Muda Sulawesi Tengah (FC Musuta) mendatangi DPRD Tingkat I Yogyakarta. Diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Drs H Alfian Darmawan dan empat pimpinan fraksi, FS Musuta menyampaikan protes atas rencana relokasi para transmigran yang sudah ditempatkan di sana sekitar empat tahun itu. Akhir April dan awal Mei 2001, ratusan petani asal Desa One Pute Jaya, yang didukung beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan beberapa aktivis mahasiswa di Palu, melakukan aksi unjuk rasa dan menginap di gedung DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah. Para petani itu mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan sertifikat lahan mereka. Mereka juga meminta PT Inco untuk segera angkat kaki dari Morowali. Lihat Anonymous, “Diprihatinkan, Relokasi Transmigran Poso.” *Jawa Pos*, 24 November (1995); Anonymous, “Relokasi Transmigran Bungku Diprihatinkan”, *Mercusuar*, 24 November (1995); Anonymous, “Warga One Pute Jaya Tagih Sertifikat Tanah”, *Surya*, 1 Mei (2001); Darlis Muhammad, “Warga Bungku Tuntut Sertifikat Tanah”, *Koran Tempo*, 1 Mei (2001); Anonymous, “Warga Bahumotefe Menginap di DPRD”, *Mercusuar*, 2 Mei (2001); Anonymous, “Warga Trans di Morowali Tuntut Sertifikat Tanah”, *Suara Pembaruan*, 2 Mei (2001); Anonymous, “Warga “Usir” INCO dari Bahumotefe”, *Mercusuar*, 1 Mei (2001); Anonymous, “Transmigran Sulteng Tuntut Lahan”, *Bisnis Indonesia*, 4 Mei (2001).

<sup>187</sup> Lihat Adi Putra, “Tambang Datang Petani Mengerang”, *Seputar Rakyat*, no. 5 (2012), 6-9; Lihat juga Carolina Christina, “Massa Bakar Kantor PT Inco di Morowali”, *Okezone.com* 6 Februari (2012) [online], Dapat diakses melalui: <http://news.okezone.com/read/2012/02/06/340/570322/massa-bakar-kantor-pt-inco-di->

tergabung dalam Gerlita melakukan aksi langsung di kamp eksplorasi Vale di Seba-seba. Warga mengusir para karyawan Vale dan menyegel kantor dan peralatan di lokasi. Buntut aksi ini, 4 anggota aparat keamanan, masing-masing dua personil dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengawasi kamp eksplorasi itu.<sup>188</sup> Contoh lain, masih di Morowali, menyusul aktivitas perusahaan-perusahaan tambang pemegang IUP sejak 2009. Di Morowali, para petani di desa Bahumakmur menuding pemegang IUP produksi, BDM, sebagai biang penyebab banjir bandang, 24 Juli 2010, yang menghancurkan sebagian lahan pertanian dan pemukiman. Diketahui, banjir menghantam desa-desa Fatufia, Bahumakmur, dan Keurea, karena perusahaan melakukan penambangan di bagian hulu. Para petani melakukan unjuk rasa di kantor BDM, 4 Agustus 2010. Pemrotes yang marah lantas menghancurkan beberapa fasilitas kantor dan rumah penginapan pimpinan perusahaan itu. Perusahaan mengklaim kerugian akibat aksi protes tersebut sekitar IDR 7 miliar.

Tanggapan terhadap aksi-aksi perlawanan petani berbeda-beda dari satu tempat dan isu ke tempat dan isu lain. Kerap terjadi, pemerintah atau perusahaan mengakomodasi tuntutan-tuntutan tertentu setelah aksi perlawanan bertahun-tahun atau karena aksi-aksi protes yang panas.<sup>189</sup> Sebaliknya, banyak kasus menunjukkan pemerintah dan atau perusahaan menempuh berbagai taktik untuk meredam aksi-aksi petani, dari cara-cara lunak hingga kekerasan-kekerasan yang mematikan. Dalam pengalaman industri pertambangan, respon paling keras dilakukan terhadap perlawanan nelayan dalam kasus pengeboran minyak lepas pantai Tiaka. Di sana, 22 Agustus 2011, aparat keamanan menembak dua peserta protes hingga tewas dan mencederai beberapa lainnya. Polisi lantas menetapkan lebih dari itu 40 peserta aksi sebagai tersangka. Tidak cukup, setelah kejadian itu, pemerintah mengerahkan dua kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan satu regu pasukan, satuan setingkat kompi (SSK), Brimob SSK untuk menjaga areal itu. Padahal, sebelum peristiwa itu, protes-protes karena ketidak-puasan sudah berlangsung sudah berulang. Di antaranya, sekitar lima tahun sebelum kejadian berdarah itu, puluhan nelayan di Morowali, dengan menggunakan perahu kecil mendatangi Lapangan Tiaka dan melakukan unjuk rasa di sana, 12 Januari 2006, ketika berlangsung seremoni pengapalan

---

[morowali](http://morowali.viva.co.id), Akses pada 12 April 2013; Arry Anggadha, "Massa Bakar Fasilitas PT. Vale di Morowali", online 7 Februari (2012). <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/286117-massa-bakar-fasilitas-pt-inco-di-morowali>, Viva.co.id 7 Februari 2012 [online]. Akses 12 Desember 2013; Rahmat, "rotester's Rage, Blaze Claim Nickel Miner's Facilities in Morowali", The Jakartaglobe.com 8 February 2012 [Online] <http://www.thejakartaglobe.com/archive/protesters-rage-blaze-claim-nickel-miners-facilities-in-morowali/>, Accessed 12 December 2013.

<sup>188</sup> Andika, "Konflik Ruang Ekstraktif di Kabupaten Morowali; Studi ekspansi pertambangan di kabupaten Morowali Sulawesi Tengah", *Kertas Posisi*, No 11, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, n.d.), 27.

<sup>189</sup> Salah satu contoh yang diterima adalah tuntutan petani di Desa One Pute Jaya untuk memperoleh sertifikat tanah yang mereka perjuangkan sejak akhir dekade 1990-an, karena lahan itu dianggap tumpang tindih dengan areal KK PT. Inco. Pada 2007, pemerintah daerah akhirnya menyerahkan sertifikat tanah eks transmigrasi itu kepada semua warga di Unit I, sementara warga di Unit II memperoleh Surat Keterangan Kepimilikan Tanah (SKPT). Selain itu, dalam kasus pemegang IUP PT. Tridaya yang beroperasi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bungku Timur, berkat aksi massa dari para petani yang menjadi korban operasi perusahaan itu, maka perusahaan dikabarkan menerima beberapa tuntutan petani. Di antaranya, perusahaan bersedia mempekerjakan buruh-buruhnya dari desa-desa di sekitar areal pertambangannya seperti One Pute Jaya, Lele, Dampala, dan Bahumotefe. Lihat Adi Putra, "Tambang Datang, Petani Mengerang".

perdana minyak mentah. Mereka mengeluh mata pencaharian sebagai nelayan menyempit dan pendapatan menurun. Mereka juga menuntut janji perusahaan yang akan memberikan sarana bagi para nelayan dan usaha perikanan.<sup>190</sup>

*Kedua*, saya mencatat, secara ideologi dan politik, sifat-sifat populisme atau populisme baru sangat mendominasi perlawanan-perlawanan itu.<sup>191</sup> Sifat-sifat ini terutama ditandai dengan penggunaan identitas-identitas etnik dan kultural dari para petani, yang menjadi korban akumulasi primitif, lebih ditonjolkan daripada identitas mereka sebagai tenaga kerja cadangan di sektor pertanian. Dalam banyak kesempatan, usaha revitalisasi masyarakat adat, sebagai strategi menghadapi akumulasi primitif, kerap bersandar kepada argumentasi yang a-historis. Ini tercermin pada usaha menonjolkan identitas kultural dan melupakan sama sekali kelas karakter dari masyarakat adat itu, baik dalam pengertian diferensiasi internal di antara mereka, maupun letak mereka dalam struktur eksternal kapitalisme. Padahal, sebagai tenaga kerja cadangan tersembunyi, di mata kelas kapitalis, mereka adalah segmen penting yang menyumbang terhadap eksploitasi kelas pekerja. Akibatnya, kita menyaksikan ketiadaan agenda untuk meletakkan perjuangan kelas sebagai isu pokok di dalam menghadapi kapitalisme.

## PENUTUP

PRAKTIK akumulasi primitif seperti yang sudah diuraikan, dalam konteks Sulawesi Tengah, merupakan sebuah proses yang panjang. Sejak era Belanda, proses ini sudah terjadi, dan tetap berlangsung hingga hari ini. Kolonialisme dengan caranya sendiri secara bertahap telah menghancurkan bentuk-bentuk masyarakat lama di daerah ini dengan mengontrol tanah dan tenaga kerja. Setelah kemerdekaan, kisah yang sama kembali terulang. Di satu sisi, proses itu ditandai dengan usaha yang sangat kompleks, oleh negara dan korporasi, untuk merampas dan atau mengontrol tanah dan sumber daya alam yang tersedia di atas dan di bawahnya sebagai prakondisi bagi produksi kapitalis skala besar berbasis sumber daya alam (*resources-based capitalist production*). Proses ini menimbulkan gangguan yang sangat serius bagi kontrol petani-petani tradisional atas tanah, baik karena perampasan tanah, maupun karena dampak perubahan ekosistem lokal. Di sisi lain, proses ini bermuara pada penciptaan kelas pekerja modern. Tetapi, seperti juga yang kita telah saksikan, penghancuran kontrol para petani atas tanah-tanah mereka, tidak serta-merta diikuti dengan penciptaan kelas pekerja modern. Tidak banyak di antara para petani yang kehilangan tanah atau tanah-tanah pertaniannya terganggu berganti baju menjadi kelas pekerja. Sebagian menjadi semi-proletar dengan menjual tenaga kerja mereka secara temporer kepada kelas kapitalis yang mengeksploitasi mereka dengan harga murah. Mereka menjadi semi-proletar, karena juga masih mengolah lahan-lahan pertanian milik mereka sendiri atau menjadi buruh tani harian di lahan-lahan pertanian milik-milik petani lain ketika tidak sedang menjual tenaga kerja kepada kelas kapitalis. Sebagian membuka usaha-usaha berskala kecil dan informal di bidang

---

<sup>190</sup> Arianto Sangaji, "Penembakan Tiaka dan Akumulasi Primitif", *Indoprogress*, III Januari (2013).

<sup>191</sup> Tentang populisme dan populisme baru lihat Tom Brass, "The Agrarian Myth, the 'New' and the 'New' Right", *Economic and Political Weekly*, January 25 (1997); Tom Brass, "Moral economist, subalterns, new social movements, and the (re-) emergence of a (post-) modernized (middle) Peasant", *Journal of Peasant Studies* 18 No 2 (1991).

perdagangan dan pelayanan jasa sebagai respon terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumtif kelas pekerja di sekitar areal industri. Sebagian kecil di antara para petani kemudian menjadi kelas pekerja modern dengan menjual sepenuhnya tenaga kerja mereka. Tetapi, mereka sendiri menghadapi resiko untuk terpelanting dari tempat kerja, karena kontrak-kontrak kerja yang fleksibel. Mereka juga berpotensi kembali menjadi petani, karena tiba-tiba perusahaan di tempat kerja tutup, setelah kalah dalam kompetisi kapitalisme. Proletarianisasi kerap berjalan bergandengan dengan proses deproletarianisasi. Yang perlu dicatat adalah bahwa proses penciptaan tenaga kerja bukan sebuah proses yang lineal, tetapi berlangsung secara berliku-liku. Proses ini seperti yang digambarkan oleh Marx dalam pengalaman historis di Inggris sebagai berikut:

“Thus were the agricultural folk first forcibly expropriated from the soil, driven from their home, turned into vagabonds, and then whipped, branded and tortured by grotesquely terroristic laws into accepting the discipline necessary for the system of wage-labour”.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Marx, *Capital Volume I*, 899.